



LAPORAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BKD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023



Pendahuluan

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Gubernur Kalimantan Tengah.



Realisasi Kinerja



Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date



Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi



Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal



Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah



Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah



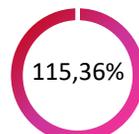
Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi Pemerintah



Indeks Profesionalitas ASN



Persentase Penurunan Peleanggaran Disiplin



Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu



Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN

Pagu APBD BKD 2023

Jenis Belanja	Total Pagu (Rp)
Belanja Operasional	14.465.106.849,00
Belanja Modal	2.351.627.065,00
Pendapatan (PAD)	20.000.000,00

Realisasi APBD BKD 2023

Jenis Belanja	Realisasi (Rp)
Belanja Operasional	12.188.696.814,00
Belanja Modal	2.339.788.000,00
Pendapatan (PAD)	48.000.000,00

**KATA
PENGANTAR**

&

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target sebagaimana indikator kinerja yang ditetapkan.

Dengan maksud di atas maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengandung unsur-unsur :

- a. Relevansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja.
- b. Keakuratan, yaitu penyajian LKIP bebas dari kesalahan perhitungan.
- c. Konsistensi, yaitu menyajikan informasi-informasi yang konsisten antara bagian sah dengan bagian lainnya.
- d. Varifiabilitas, yaitu informasi yang disajikan dalam LKIP dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendahulu.
- e. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap, padat dan ringkas.
- f. Tepat waktu, yaitu LKIP disampaikan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambilan keputusan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun berjalan terhadap pelaksanaan program dan kinerja.

Atas segala upaya dan keterbatasan yang ada sehingga laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat terwujud, tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan dan partisipasinya baik itu materi maupun imaterial. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua.

Palangka Raya, 14 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LISDA ARRIYANA, S.Sos

Perdana Utama Madya

NIP. 196809011989112005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. <i>CASCADING</i> KINERJA DAN PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1
C. KELEMBAGAAN	3
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	10
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2023	13
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
A.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI	16
A.2 TUJUAN DAN SASARAN	17
B. STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN BKD TAHUN 2023	21
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA	22
D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA	26
D.1 SISTEM PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU	26
D.2 SISTEM APLIKASI TERAMPIL DAN TANGGUH (SiTAGUH) BKD	27
D.3 SINERJA BKD KALTENG	28
D.5 WEBSITE RESMI BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	29
D.6 PELAKSANAAN SELEKSI YANG BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN KOMPETENSI MENGGUNAKAN <i>COMPUTER ASSISTED TEST</i> (CAT)	30
AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023	32
A.1 IKU 1	35
A.2 IKU 2	43
A.3 IKU 3	50
A.4 IKU 4	53
A.5 IKU 5	59
A.6 IKU 6	62
A.7 IKU 7	67
A.8 IKU 8	71
A.9 IKU 9	79
A.10 IKU 10	82
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA YANG RELEVAN TAHUN 2023	86
B.1 INDEKS NSPK	86
B.2 . SURVEI KEPUASAN ASN TERHADAP PEMBINAAN MANAJEMEN ASN YANG DISELENGGARAKAN BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	88

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM PENCAPAIAN KINERJA	91
D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	91
<u>PENUTUP</u>	96
A. KESIMPULAN	96
B. REKOMENDASI	98
<u>DAFTAR TABEL</u>	III
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	IV
<u>LAMPIRAN</u>	VI

DAFTAR TABEL

TABEL 1 INVENTARISASI ASET BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	8
TABEL 2 ALOKASI APBD BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	10
TABEL 3 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2022	14
TABEL 4 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKD (2021-2026)	18
TABEL 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BKD (2021-2026)	20
TABEL 6 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	21
TABEL 7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BKD TAHUN 2023	23
TABEL 8 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	32
TABEL 9 CAPAIAN KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	33
TABEL 10 CAPAIAN IKU 1 : PERSENTASE PEGAWAI PERANGKAT DAERAH DENGAN DATA KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI DAN UP TO DATE	38
TABEL 11 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA IKU 1	43
TABEL 12 CAPAIAN IKU 2 : PERSENTASE PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INSTANSI	45
TABEL 13 REKAPITULASI JUMLAH PESERTA SELEKSI PPPK TAHUN 2023	47
TABEL 14 PERSENTASE KEBUTUHAN ASN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022-2023	49
TABEL 15 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA IKU 2	49
TABEL 16 CAPAIAN IKU 3 : PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	51
TABEL 17 CAPAIAN IKU 4 : JUMLAH JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA INSTANSI PEMERINTAH	55
TABEL 18 CAPAIAN IKU 5 : JUMLAH JABATAN ADMINISTRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH	60
TABEL 19 CAPAIAN IKU 6 : JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL PADA INSTANSI PEMERINTAH	63
TABEL 20 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA IKU 6	66
TABEL 21 NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	68
TABEL 22 CAPAIAN IKU 7 : INDEKS PROFESIONALITAS ASN	68
TABEL 23 PERBANDINGAN NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	69
TABEL 24 PERBANDINGAN NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	70
TABEL 25 PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT PELANGGARAN DISIPLIN ASN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	76
TABEL 26 CAPAIAN IKU 8 : PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	76
TABEL 27 REKAPITULASI LAYANAN KEPEGAWAIAN BKD TAHUN 2023	79
TABEL 28 CAPAIAN IKU 9 : PERSENTASE USULAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG DITINDAKLANJUTI SECARA TEPAT WAKTU	80
TABEL 29 CAPAIAN IKU 10 : PERSENTASE ASN YANG LULUS DALAM PENGUKURAN KOMPETENSI ASN	83
TABEL 30 PERBANDINGAN NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	87
TABEL 31 REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	94

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 CASCADING KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2023	2
GAMBAR 2 PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2023	3
GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	5
GAMBAR 4 RASIO JUMLAH PEGAWAI BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN	6
GAMBAR 5 JUMLAH PEGAWAI BKD BERDASARKAN USIA	6
GAMBAR 6 JUMLAH PEGAWAI BKD BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	6
GAMBAR 7 JUMLAH PEGAWAI BKD BERDASARKAN JABATAN	7
GAMBAR 8 JUMLAH PEGAWAI BKD BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG	7
GAMBAR 9 ISU-ISU STRATEGIS BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	11
GAMBAR 10 PERJANJIAN KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2023	25
GAMBAR 11 RUANGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	26
GAMBAR 12 ALUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BKD	27
GAMBAR 13 APLIKASI SI TAGUH BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	27
GAMBAR 14 APLIKASI SINERJA	28
GAMBAR 15 LAMAN E-KINERJA PADA APLIKASI SINERJA	29
GAMBAR 16 TAMPILAN WEBSITE BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	30
GAMBAR 17 RUANG CAT BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	31
GAMBAR 18 REALISASI CAPAIAN KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	34
GAMBAR 19 REKAPITULASI JUMLAH ASN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	36
GAMBAR 20 PROSES BISNIS TERSELENGGARANYA PELAYANAN DATA KEPEGAWAIAN	37
GAMBAR 21 PROSES BISNIS TERBANGUNNYA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS ONLINE DAN TERINTEGRASI	37
GAMBAR 22 TERSUSUNNYA DATA KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA SERTA TERINTEGRASI DENGAN DATA KEPEGAWAIAN LAINNYA DALAM SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	37
GAMBAR 23 REALISASI IKU 1 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	38
GAMBAR 24 GRAFIK CAPAIAN PERSENTASE PEGAWAI PERANGKAT DAERAH DENGAN DATA KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI DAN UP TO DATE TAHUN 2022-2023	39
GAMBAR 25 KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	40
GAMBAR 26 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2022	41
GAMBAR 27 PENANDATANGANAN BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	42
GAMBAR 28 PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	43
GAMBAR 29 PROSES BISNIS TERSEDIAINYA PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN	44
GAMBAR 30 REALISASI IKU 2 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	45
GAMBAR 31 GRAFIK CAPAIAN PERSENTASE PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INSTANSI TAHUN 2022-2023	46
GAMBAR 32 PELAKSANAAN TES KOMPETENSI PPPK TAHUN 2023 YANG BERTEMPAT DI GEDUNG CAT UPT BKN PALANGKA RAYA	47
GAMBAR 33 PERGERAKAN JUMLAH PNS DI INDONESIA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR	48
GAMBAR 34 PERSENTASE KEBUTUHAN ASN SECARA NASIONAL	48
GAMBAR 35 PROSES BISNIS TERFASILITASINYA PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	51

GAMBAR 36 REALISASI IKU 3 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	51
GAMBAR 37 GRAFIK CAPAIAN PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL TAHUN 2022-2023	52
GAMBAR 38 GUBERNUR KALTENG H. SUGIANTO SABRAN SAAT MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAAH/JANJI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	53
GAMBAR 39 PROSES BISNIS DITEMPAKANNYA JPT DAN JA	54
GAMBAR 40 REALISASI IKU 4 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	55
GAMBAR 41 PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH/JANJI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 28 AGUSTUS 2023	56
GAMBAR 42 GRAFIK CAPAIAN JUMLAH JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022-2023	57
GAMBAR 43 SELEKSI JOB FIT ESELON II PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	57
GAMBAR 44 ASN DI INDONESIA BERDASARKAN JENIS JABATAN TAHUN 2023	58
GAMBAR 45 PROSES BISNIS DITEMPAKANNYA JPT DAN JA	59
GAMBAR 46 REALISASI IKU 5 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	60
GAMBAR 47 GRAFIK CAPAIAN JUMLAH JABATAN ADMINISTRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH	61
GAMBAR 48 PENGAMBILAN SUMPAAH/JANJI DAN PELANTIKAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALTENG TAHUN 2023	62
GAMBAR 49 PROSES BISNIS TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KARIR ASN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SESUAI SISTEM MERIT	63
GAMBAR 50 REALISASI IKU 6 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	64
GAMBAR 51 GRAFIK CAPAIAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH	64
GAMBAR 52 PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	65
GAMBAR 53 KEPALA BKD PROV KALTENG MEMBACAKAN SUMPAAH JANJI JABATAN DIKUTI OLEH ASN YANG DILANTIK PADA RSUD DR. DORIS SYLVANUS	66
GAMBAR 54 REALISASI IKU 7 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	68
GAMBAR 55 GRAFIK CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN TAHUN 2022-2023	69
GAMBAR 56 ALUR PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN	71
GAMBAR 57 ALUR PEMANGGILAN	72
GAMBAR 58 ALUR PEMERIKSAAN	72
GAMBAR 59 KEPALA BKD PROV. KALTENG MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA PESERTA WORKSHOP APLIKASI SINERJA	73
GAMBAR 60 PENYAMPAIAN MATERI WORKSHOP APLIKASI SINERJA	74
GAMBAR 61 PELAKSANAAN SOSIALISASI E-KINERJA BKN TAHUN 2023	75
GAMBAR 62 REALISASI IKU 8 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	77
GAMBAR 63 GRAFIK CAPAIAN PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	77
GAMBAR 64 REALISASI IKU 9 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	81
GAMBAR 65 GRAFIK CAPAIAN PERSENTASE USULAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG DITINDAKLANJUTI SECARA TEPAT WAKTU TAHUN 2022-2023	81
GAMBAR 66 REALISASI IKU 10 SAMPAI DENGAN TA 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021-2026	83
GAMBAR 67 GRAFIK CAPAIAN PERSENTASE ASN YANG LULUS DALAM PENGUKURAN KOMPETENSI ASN TAHUN 2022-2023	84
GAMBAR 68 SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	84
GAMBAR 69 PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	85
GAMBAR 70 GRAFIK PERBANDINGAN PENILAIAN INDEKS NSPK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022-2023	87
GAMBAR 71 SURVEI TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	89
GAMBAR 72 KEPALA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BESERTA JAJARAN ESELON III BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	96

LAMPIRAN

- Laporan Hasil Evaluasi SAKIP BKD Tahun 2022
https://drive.google.com/file/d/12kcl8pkhgRiM-E5MF5C8v6xdAymXf90s/view?usp=drive_link
- Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
https://drive.google.com/file/d/1Qb3EahgWmq_0f83n3boUIWFZyX02ivs5/view?usp=share_link
- Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
https://drive.google.com/file/d/1tHPE3ejTnUEr0i0vnjhEQyC77Gsm2aN7/view?usp=drive_link
- Rencana Aksi Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023
<https://drive.google.com/file/d/1zdVHy-tKwgh0JTMgWC5MNIA1-tYTEbAS/view?usp=sharing>
- SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Manual IKU BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
<https://drive.google.com/file/d/1qUPOAWKansu8irlMngsobqMd-JpGLDPd/view?usp=sharing>
- Reviu IKU BKD Tahun 2023
https://drive.google.com/file/d/1K5lxkRepVU5vt3Yy_0GPuEjTevSkraJx/view?usp=sharing
- Rencana Kinerja Tahunan BKD Tahun 2024
<https://drive.google.com/file/d/16gH5TSKZ0E8A6kB-KwJuTiY-6z01kNix/view?usp=sharing>
- Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV BKD Provinsi Kalimantan Tengah
<https://drive.google.com/file/d/1aKsyUpnfHvcfNuapHeyCYwVLAWnmAR7B/view?usp=sharing>
- Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah
<https://drive.google.com/file/d/1RezvVn47C99LeXpoXDpL-yPskr-lAXtF/view?usp=sharing>
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
<https://drive.google.com/drive/folders/1FyN4-1nb0Y8fWCqHBIymsegSNcL2dAtu?usp=sharing>
- Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan APBD BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
<https://drive.google.com/drive/folders/1yWBLzYRYfF1X0DePaRQvckJ5WY13JRzl?usp=sharing>
- Laporan Kinerja Triwulan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
https://drive.google.com/drive/folders/1BEVof0b_9L4PpQVAin3rv0LE34S4Ta06?usp=sharing

Bab 1

PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas profil BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta menjabarkan maksud, tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP tahun 2023

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat :

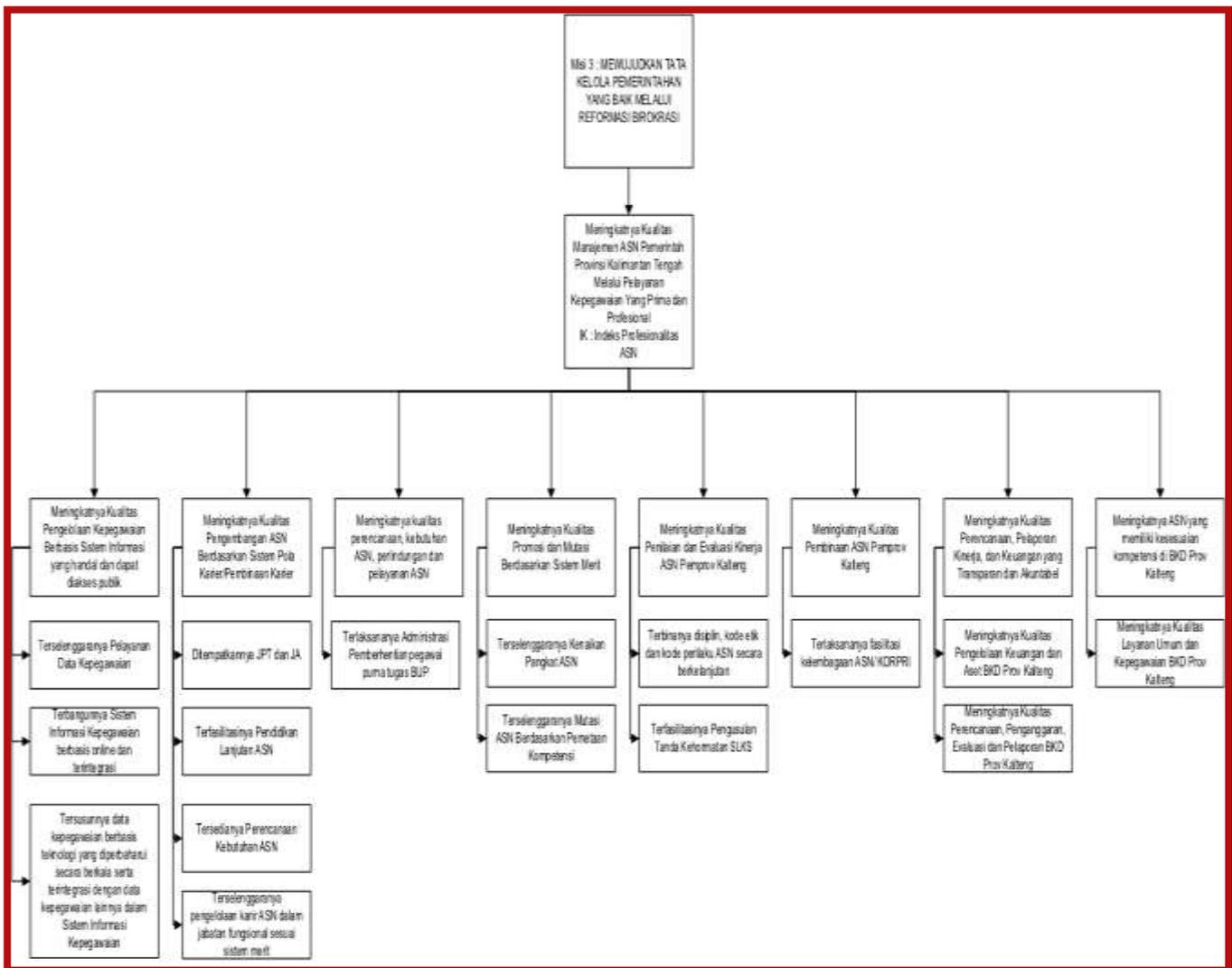
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Cascading Kinerja dan Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. *Cascading* Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Gambar 1 Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

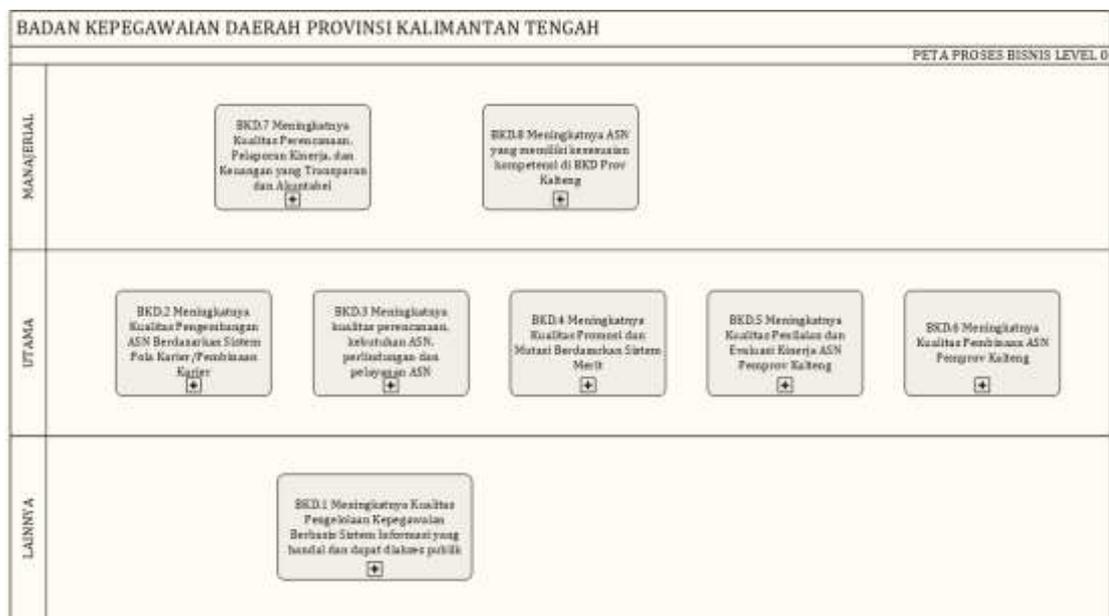


Sumber : Dokumen Proses Bisnis, BKD Prov Kalteng 2023

Suatu proses bisnis yang baik harus mempunyai tujuan mengefektifkan, mengefisienkan dan meningkatkan produktifitas dari suatu organisasi. Suatu organisasi secara umum tentu saja mempunyai tujuan agar dapat bertahan hidup selama mungkin dan selalu meningkat kinerja serta produktifitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka suatu organisasi membutuhkan suatu proses bisnis yang baik untuk mendukung berjalannya organisasi tersebut.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi publik membutuhkan suatu proses bisnis yang baik agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun proses bisnis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 bagian antara lain sebagai berikut :

Gambar 2 Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023



Sumber : Dokumen Proses Bisnis, BKD Prov Kalteng 2023

C. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain : **aspek organisasi, sumber daya manusia, serta pendanaan.**



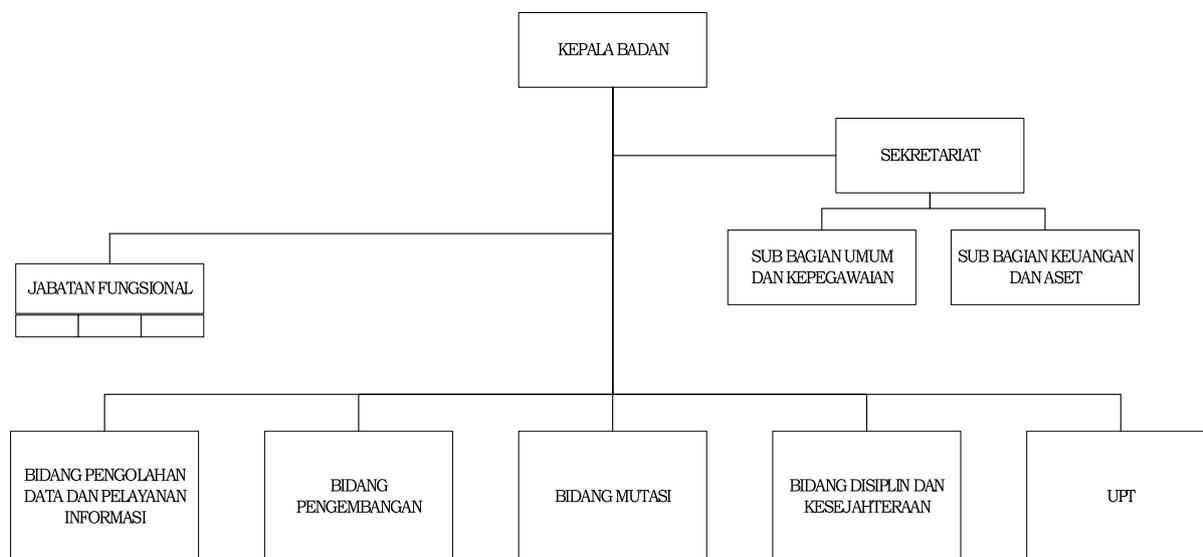
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang manajemen ASN daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
2. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
7. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
8. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
9. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

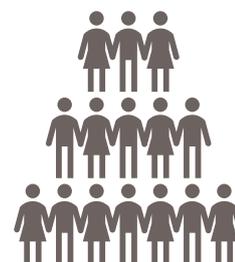
BKD Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdapat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah :

Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



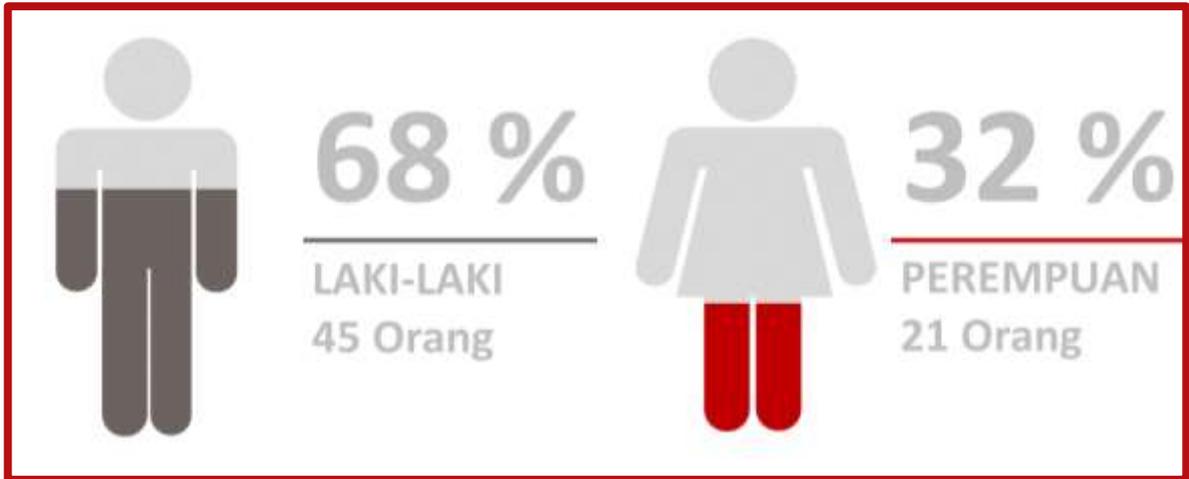
Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program Berdasarkan DUK SOPD BKD, BKD Prov. Kalteng 2023

Aspek Sumber Daya Perangkat Daerah



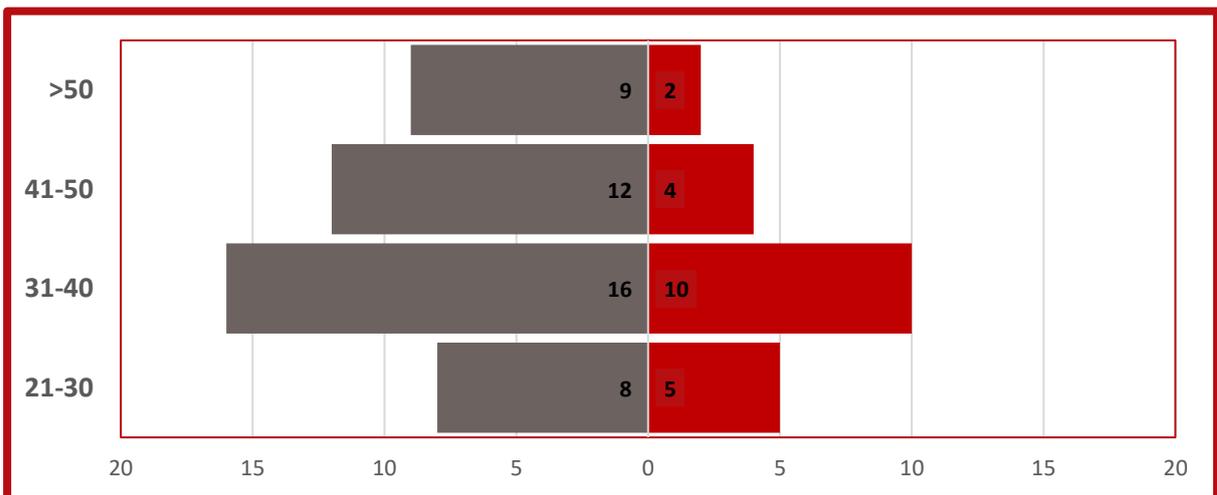
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan keadaan per 31 Desember 2023 sebanyak 66 orang (sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKD Prov Kalteng, 2023) dengan klasifikasi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, jabatan dan jenis kelamin sebagaimana berikut :

Gambar 4 Rasio Jumlah Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin



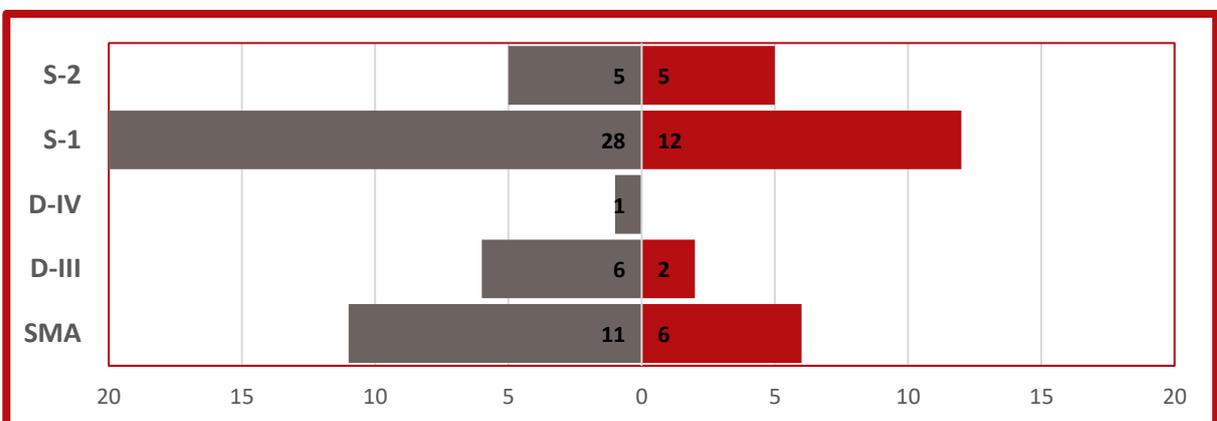
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2023

Gambar 5 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Usia



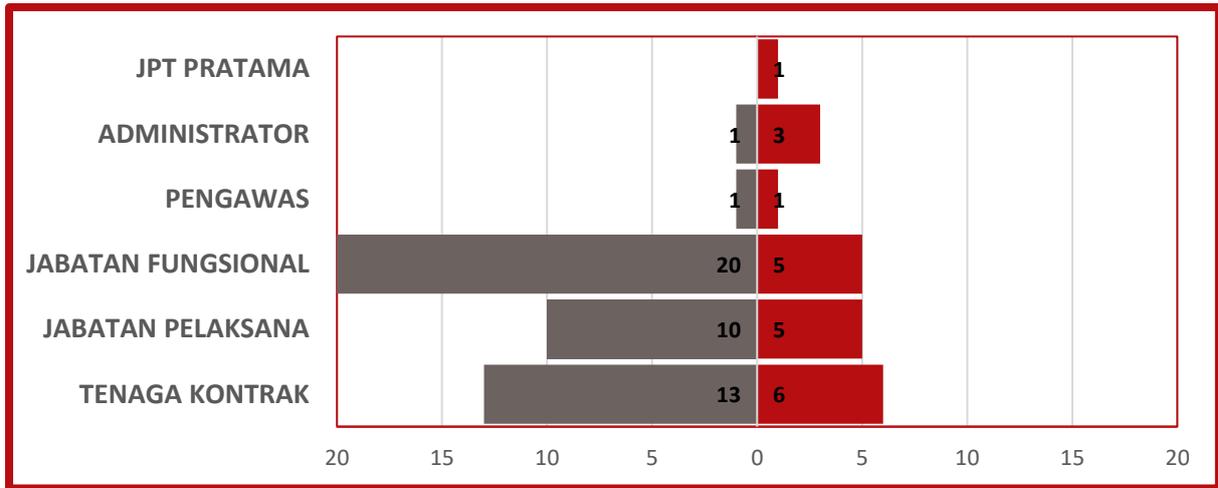
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2023

Gambar 6 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



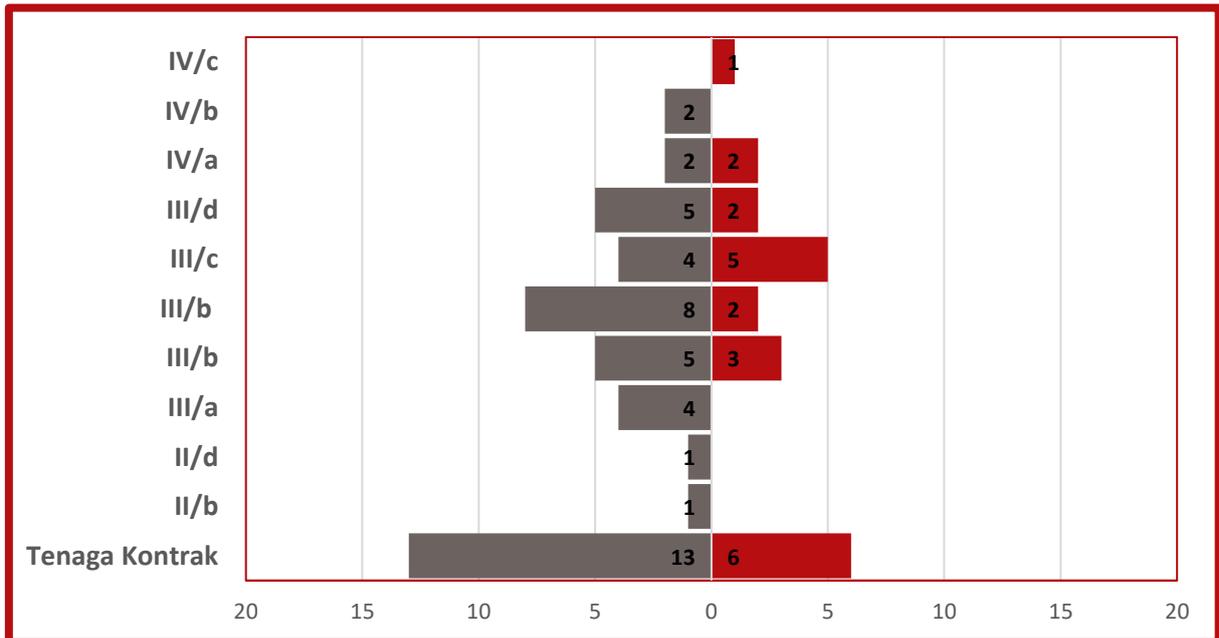
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2023

Gambar 7 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2023

Gambar 8 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2023

Aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Inventarisasi Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No. Urut	Kode	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	3	4	5	6	7
	1.3	ASET TETAP	1.404	16.493.592.645,76	
1	1	TANAH	-	0	
	1.01	TANAH	-	0	
2	2	PERALATAN DAN MESIN	1.384	6.968.223.983,76	
	2.01	ALAT BESAR	-	0	
	2.02	ALAT ANGKUTAN	34	2.235.905.011,00	
	2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	
	2.04	ALAT PERTANIAN	4	10.060.244,00	
	2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	925	2.032.479.257,76	
	2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	32	240.106.709,00	
	2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	
	2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	
	2.09	ALAT PERSENJATAAN	6	11.360.244,00	
	2.10	KOMPUTER	382	2.436.562.518,00	
	2.11	ALAT EKSPLORASI	-	0	
	2.12	ALAT PENGEBORAN	-	0	
	2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	0	
	2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	0	
	2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	0	
	2.16	ALAT PERAGA	-	0	
	2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	0	
	2.18	RAMBU-RAMBU	-	0	
	2.19	PERALATAN OLAH RAGA	1	1,750,000.00	
3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	10	8,049,941,002.00	
	3.01	BANGUNAN GEDUNG	9	8,001,112,202.00	
	3.02	MONUMEN	1	48,828,800.00	
	3.03	BANGUNAN MENARA	-	0	
	3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	0	
4	4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	9	1,182,421,660.00	
	4.01	JALAN DAN JEMBATAN	2	817,461,950.00	
	4.02	BANGUNAN AIR	-	0	
	4.03	INSTALASI	5	253,830,010.00	
	4.04	JARINGAN	2	111,129,700.00	
5	5	ASET TETAP LAINNYA	1	293,006,000.00	
	5.01	BUKU PERPUSTAKAAN	-		
	5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	0	
	5.03	HEWAN	-	0	
	5.04	BIOTA PERAIRAN	-	0	
	5.05	TANAMAN	1	293,006,000.00	

No. Urut	Kode	NamaBarang	Jumlah Barang	Nilai(Rp)	Keterangan
	5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	0	
	5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	0	
6	6	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	0	
	6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	0	
	1.5	ASET LAINNYA	277	1.860.192.053,92	
1	2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	0	
	2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	0	
2	3	ASET TIDAK BERWUJUD	12	956.654.000,00	
	3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	12	956.654.000,00	
3	4	ASET LAIN-LAIN	265	903.538.053,92	
	4.01	ASET LAIN LAIN	265	903.538.053,92	
		TOTAL		18.353.784.699,68	

Sumber : Lampiran Neraca Aset, BKD Prov Kalteng 2023

Kendaraan dinas terdiri dari 7 (tujuh) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional (pick up), 1 (satu) unit kendaraan roda tiga (angkutan barang), dan 22 (dua puluh dua) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, pos jaga keamanan, ruang CAT, aula, ruang tunggu pelayanan terpadu satu pintu, ruang laktasi, mushola, gudang, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

Aspek Pendanaan



Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun alokasi anggaran masing-masing unit kerja BKD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Alokasi APBD Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
TA 2018 - 2023

BIDANG	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sekretariat	3.757.687.841	4.643.672.100	2.770.298.549	9.386.040.034	10.685.319.129	12.019.440.795
Pengolahan Data Dan Pelayanan Informasi	1.178.985.150	798.530.900	310.414.050	159.591.750	327.482.000	451.150.600
Pengembangan	2.538.732.972	1.682.171.458	640.748.200	439.307.800	2.086.722.500	1.591.905.300
Mutasi	600.950.000	566.290.000	116.721.050	1.524.544.000	111.260.000	270.176.600
Disiplin Dan Kesejahteraan	3.701.948.243	1.829.129.000	311.581.500	897.233.500	1.662.870.500	2.484.060.619
TOTAL PAGU	11.778.304.206	9.519.793.458	4.149.763.349	12.406.717.084	14.873.654.129	16.816.733.914

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan, BKD Prov Kalteng 2018-2023

D. Aspek Strategis Organisasi

Penerapan Sistem Merit yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam pemberdayaan sumber daya aparatur pemerintahan. Semakin mantapnya kebijakan pemberdayaan sumber daya aparatur yang memberi arahan pentingnya penggunaan pendekatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur guna meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai proses integral yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

Isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi perhatian bagi peningkatan kualitas manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 9 Isu-Isu Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Dokumen Rencana Strategis, BKD Prov Kalteng 2021-2026

1) *Grand Design* Manajemen ASN

Penyusunan *grand design* manajemen ASN dibuat untuk kurun waktu 5 tahunan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah. *Grand design* ini akan berisi *roadmap* dari setiap batasan waktu yang ditentukan sehingga dapat menjadi acuan program dan kegiatan bagi BKD Provinsi Kalimantan Tengah yang selaras antar unit kerja. *Grand design* manajemen ASN akan diklasifikasikan dalam 6 (enam) dimensi sesuai dengan fokus reformasi birokrasi manajemen ASN, sebagai berikut :

- a. Dimensi perencanaan SDM Aparatur (*Human Capital Planning*) yang mencakup penyusunan formasi kebutuhan jabatan setiap unit kerja di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan evaluasi jabatan dan beban kerja yang ditentukan.
- b. Dimensi rekrutmen dan seleksi yang mencakup pembaharuan pola rekrutmen dan seleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menggunakan *multiple assessment* selain CAT, juga penilaian kualitatif melalui teknik-teknik psikotes, wawancara mendalam untuk menilai karakter dan kesesuaian budaya organisasi dan *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan pelamar, sehingga didapatkan gambaran karakter, kompetensi serta ketrampilan yang unggul.

- c. Dimensi pengembangan kompetensi (Human Capital Development) yang mencakup sistem pelatihan dan pengembangan; kebijakan umum dalam menyusun sistem pengembangan kompetensi ASN dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Dimensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan melalui asesmen kepegawaian yang terstruktur, sistem manajemen berbasis kinerja serta penyusunan kebijakan terkait penghargaan bagi PNS berprestasi sebagai *leverage factors* yang mendukung kinerja dan motivasi kerja ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Dimensi promosi, rotasi dan karir yang mencakup :
 - Pemetaan kompetensi individu dan redistribusi PNS sehingga tercipta prinsip “*right men on the right place*”
 - Sistem manajemen talenta, diperlukan untuk memperoleh kader-kader terbaik ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi pimpinan di masa yang akan datang.
 - Sistem pola karir, perlunya menyusun jalur karir baik untuk jabatan struktural maupun jabatan fungsional sehingga terpelihara motivasi kerja yang tinggi.
 - Penerapan sistem merit, sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang UU ASN, penerapan sistem merit menjadi hal yang krusial untuk dilakukan melalui berbagai program seperti seleksi terbuka JPT serta Seleksi CPNS dan PPPK.
- f. Dimensi purnabakti yang mencakup pengembangan sistem pensiun yang mampu memberikan pelayanan bagi ASN yang sudah mencapai batas usia pensiun (BUP), terutama terkait ketepatan waktu penerbitan SK pensiun dan pemberian hak-hak pensiun serta perbekalan setelah mencapai batas usia pensiun (BUP).

2) Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja

Penerapan manajemen berbasis kinerja diawali dengan penyusunan indikator-indikator aktivitas kerja yang terukur pada setiap posisi/jabatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator-indikator ini dapat diklasifikasikan menjadi indikator kinerja Kepala SKPD, indikator kinerja Kepala Bagian/Bidang/UPT dan indikator kinerja individu jabatan pelaksana yang diturunkan (*cascading*) dari visi, misi dan sasaran kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2021-2024. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem informasi manajemen berbasis

kinerja yang terintegrasi dengan system *reward and punishment* yang jelas, sehingga akan terbentuk mekanisme kerja yang terukur dan sesuai dengan kontrak kinerja yang menjadi target pencapaian masing-masing SKPD.

3) Internalisasi Budaya Organisasi

Budaya organisasi menjadi faktor pengungkit dalam menciptakan ASN Provinsi Kalimantan Tengah yang profesional, berintegritas, melayani, dan bebas korupsi. Proses internalisasi budaya organisasi memerlukan komitmen pimpinan yang kuat, serta agen perubahan (*agent of change*) di setiap SKPD. Selain itu, kontinuitas program internalisasi budaya organisasi menjadi kunci utama keberhasilan program sehingga dukungan anggaran dan waktu yang panjang menjadi faktor yang krusial.

4) Pengembangan Kapasitas ASN BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk meningkatkan kapasitas ASN BKD Provinsi Kalimantan Tengah akan dilakukan berbagai kegiatan seperti kaji banding pada Kementerian/Lembaga yang telah memiliki *role model* unggul di bidang pengelolaan kepegawaian, *coaching and counseling* yang dilakukan atasan kepada bawahannya melalui mekanisme manajemen berbasis pengetahuan (*knowledge management*) serta keikutsertaan dalam program diklat yang berbasis sertifikasi.

E. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2023

Berdasarkan Laporan Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, Nomor : 700/515/LHE/2023/INSP, Tanggal : 05 Mei 2023, Untuk meningkatkan nilai kinerja Tahun 2023, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2022

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Memperbaiki SOP pengumpulan Data Kinerja dengan melengkapi/mencantumkan cara/teknis mengukur indikator capaian kinerja	SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Manual IKU terlampir pada Laporan Kinerja BKD Tahun 2023
	Menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Pengumpulan data kinerja telah dilakukan melalui aplikasi SINERIA pada tahun 2023
	Memfaatkan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Telah dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Sistem Aplikasi Kinerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi masih dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri
	Memfaatkan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam penyusunan LKIP	Pada LKIP BKD tahun 2023 telah ditampilkan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah (Benchmark Kinerja) dalam penyusunan LKIP	Pada LKIP BKD tahun 2023 telah ditampilkan <i>benchmark</i> kinerja.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di tahun 2023. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Melalui analisis capaian target kinerja, BKD Provinsi Kalimantan Tengah akan mampu untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) yang dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian Laporan Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta menjabarkan maksud, tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP tahun 2023.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Kinerja tahun 2023.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan analisis capaian kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, baik capaian kegiatan maupun sasaran strategis tahun 2023 termasuk akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh serta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Kinerja tahun 2023

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya, Renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A. Rencana Strategis



A.1 Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 di buat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2024 adalah sebagai berikut :

VISI
Kalimantan Tengah Makin
**BERKAH : Bermartabat,
Elok, Religius, Kuat,
Amanah, dan Harmonis**

MISI

- Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif, dan Berwawasan Lingkungan
- Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi
- Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing
- Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

H. SEGANTO SAMBAN
Gubernur Kalimantan Tengah

H. EDY PRATOWO
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian **Misi Ketiga** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi**. Dalam lingkup bidang kepegawaian, misi ini mengisyaratkan perlunya BKD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada pelayanan kepegawaian untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN.

A.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi. Rumusan tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:



Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Kompeten, Kompetitif, dan Profesional

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran perwakilan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Adapun isi sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD (2021-2026)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Kompeten, Kompetitif, dan Profesional	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	83,00%	85,00%	88,00%	90,00%	95,00%
			Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
			Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
			Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	54	54	54	54	54
			Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1006	1010	1013	1015	1017
			Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6000	6200	6400	6600	6800

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	75,50	76,00	77,70	78,00	78,50
			Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
			Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	95,00%
			Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	70,00%	72,00%	72,00%	75,00%	75,00%

Sumber : Dokumen Rencana Strategis BKD Prov. Kalteng 2021-2026

Berikut ini merupakan tabel keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 :

Tabel 5 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKD (2021-2026)

Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis				
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Kompeten, Kompetitif, dan Profesional	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Penyusunan Grand Design Manajemen ASN	Penyusunan Formasi sesuai kebutuhan jabatan setiap unit sesuai dengan analisis beban kerja
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Pelaksanaan rekrutmen, seleksi terbuka jabatan, mutasi dan rotasi SDM sesuai kompetensi	Penetaan kompetensi individu dan redistribusi PNS sehingga tercipta prinsip <i>right men on the right place</i>
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		Penerapan Sistem Merit
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi		Penerapan Manajemen Talenta
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN		Pembaharuan pola rekrutmen dan seleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menggunakan <i>assesment</i>
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN		Mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN
			Melakukan internalisasi budaya organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Sistem reward dan punishment yang terintegrasi melalui e-kinerja
				Melakukan pembinaan profesi melalui jiwa korps dan kode etik PNS secara berkelanjutan
	Penetapan Agen Perubahan			
		Penandatanganan Pakta Integritas		

Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis				
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian	Sinkronisasi data SIMPEG dengan data dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN
		Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Penerapan sistem pelayanan Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	Monitoring dan evaluasi terkait Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian
			Pengembangan Kapasitas ASN BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Keikutsertaan ASN BKD dalam program diklat pengelolaan kepegawaian yang berbasis sertifikat

Sumber : Dokumen Rencana Strategis BKD Prov. Kalteng 2021-2026

B. Struktur Program dan Anggaran BKD Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Struktur Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	1.468.767.600
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.987.357.620
		Pengembangan Kompetensi ASN	75.221.900
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	206.545.999
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.990.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
	DAERAH PROVINSI		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.936.930.459
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.875.267.107
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.326.599.255
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.286.224
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.418.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.349.750
JUMLAH			16.816.733.914

Sumber : DPPA APBD BKD Prov. Kalteng 2023

C. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Berdasarkan dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, terdapat 10 (sepuluh) IKU dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7 Indikator Kinerja Utama BKD Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan <i>up to date</i>	$\frac{\text{Jumlah Pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian yang sudah terintegrasi, valid dan up to date}}{\text{Jumlah pegawai perangkat daerah secara keseluruhan}} \times 100\%$	SIMPEG Kalteng
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	$\frac{\text{Jumlah formasi jabatan yang sudah terisi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pegawai}} \times 100\%$	Dokumen Bezzeting Formasi Instansi Pemprov Kalteng, Dokumen Laporan Kegiatan Seleksi CPNS, Dokumen Anjab ABK Pemprov Kalteng
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	$\frac{\text{Jumlah ASN yang melanjutkan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar}}{\text{Jumlah kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Instansi}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar, Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Jumlah Jabatan Tinggi yang terisi pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Jumlah Jabatan Administrasi yang terisi pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	Jumlah ASN yang telah diangkat dengan Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
		Indeks Profesionalitas ASN	Skor yang didapatkan berdasarkan pada peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	SAPK BKN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun (n-1)}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">Dikurangi</p> $\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun (n)}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
		Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	<p><i>Usulan Layanan Kepegawaian dimaksud meliputi : Tugas Belajar, Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pencantuman Gelar, Karis/Karsu, Usul Satyalencana Karya Satya, SKP Eselon II, Perbaikan/Update Data, Cuti dan Pensiun (Layanan Kepegawaian dalam aplikasi si TAGUH BKD)</i></p> $\frac{\text{Jumlah Usulan layanan kepegawaian yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah semua usulan layanan kepegawaian yang masuk ke BKD dalam satu tahun}} \times 100\%$	Aplikasi Si TAGUH BKD
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	<p><i>Pengukuran Kompetensi ASN dimaksud meliputi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, Assesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka JPT dan Job Fit</i></p> $\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus}}{\text{Jumlah peserta keseluruhan}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, Assesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka JPT dan Job Fit

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2023



Gambar 10 Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428 email: bkd@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	90%
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	75%
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase	70%
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Orang	54
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Orang	1010
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	Orang	6200
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,00
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	0,10%
		Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	85%
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	72%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 12.234.383.622	
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp 4.371.589.899	
Jumlah	Rp 16.605.973.521	

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

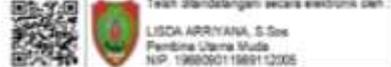


Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

LUSCA ARRYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 1960201198912005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa sistem informasi yang membantu mewujudkan pelayanan prima dan layanan kepegawaian yang transparan bagi ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Instrumen pendukung capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

D.1 Sistem Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu

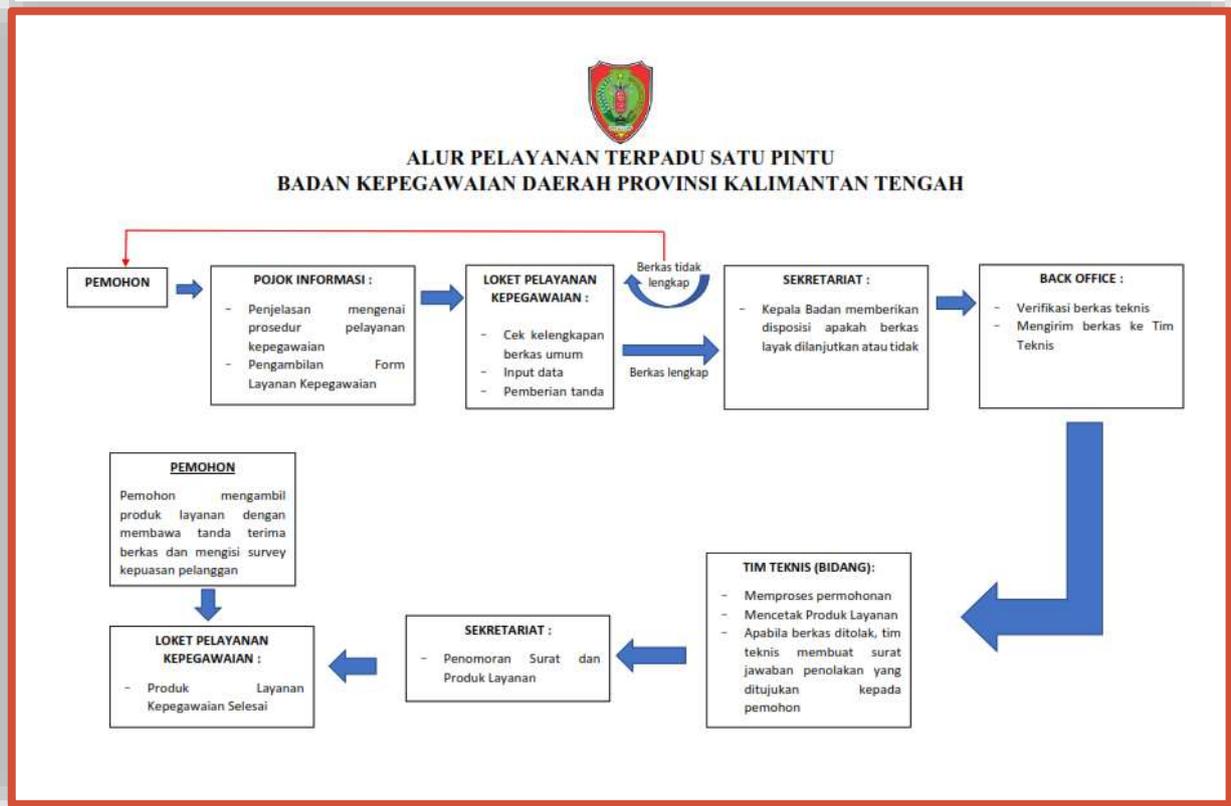
Dalam rangka mewujudkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik. Selama ini, pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dirasa masih belum optimal karena sebelumnya untuk pelayanan konsultasi maupun pelayanan proses administrasi kepegawaian, dilakukan di ruang kerja masing-masing bidang. Sebagai bentuk inovasi maka disiapkan ruang pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu yang disiapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dilengkapi dengan ruang tunggu dan ruang konseling. SOP pelayanan tersebut memiliki standar yang jelas, dari persyaratan, waktu serta tidak dipungut biaya.

Gambar 11 Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKD Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Dokumentasi PPID, BKD 2023

Gambar 12 Alur Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKD

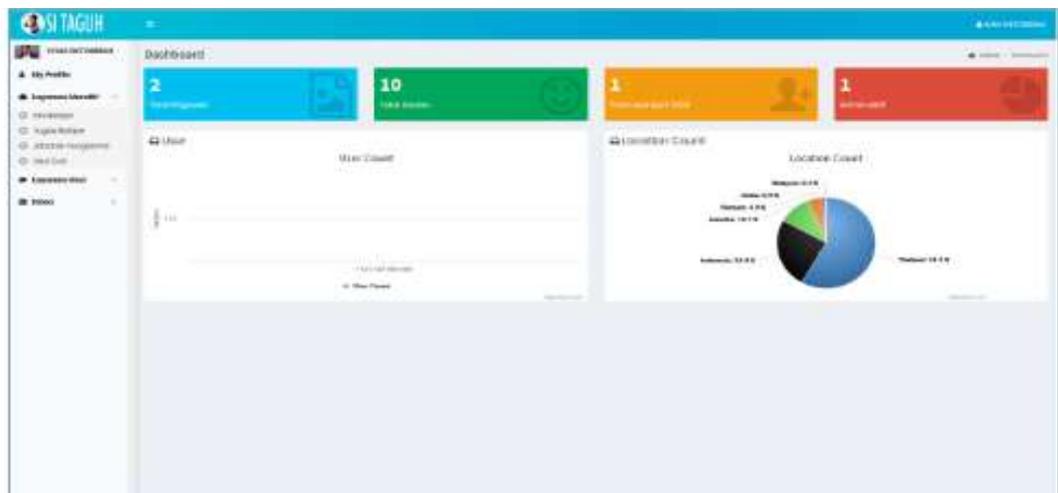


Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD 2023

D.2 Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SiTAGUH) BKD

Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SiTAGUH) merupakan Aplikasi Layanan Kepegawaian yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini mencakup semua Pelayanan yang dilayani oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri. Gambaran Aplikasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 13 Aplikasi Si TAGUH BKD Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Sub Bidang Pengolahan Data, BKD 2022

Dalam aplikasi Si TAGUH terdapat layanan sebagai berikut :

- a. Menu Layanan Mandiri meliputi
 - i. Sub menu Izin Belajar
 - ii. Sub menu Tugas Belajar
 - iii. Sub menu Jabatan Fungsional

- b. Menu Layanan Usul
 - i. Sub Menu UKP
 - ii. Sub Menu Mutasi PNS
 - iii. Sub Menu Cantum Gelar
 - iv. Sub Menu Karis/Karsu
 - v. Sub Menu Perbaikan Data
 - vi. Sub Menu Usulan Cuti
 - vii. Sub Menu Usul Pensiun

D.3 SINERJA BKD Kalteng

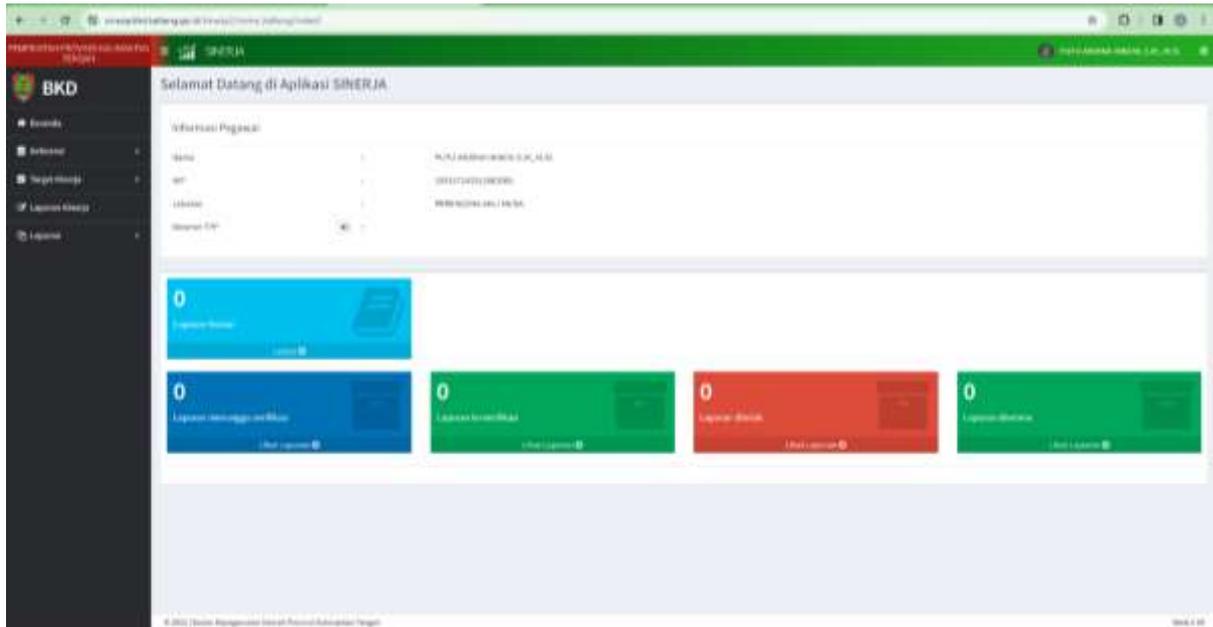
Memasuki awal tahun 2023, bagi Aparatur Sipil Negara mengisyaratkan bahwa penyampaian Perencanaan Dokumen Kinerja ASN Tahun 2023 wajib tersaji. Penetapan serta klarifikasi ekspektasi dalam perencanaan kinerja mengakomodir target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dalam hal tersebut dilakukan kegiatan dialog kinerja untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi pimpinan terhadap peran pegawai ASN dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Gambar 14 Aplikasi SINERJA



Sumber : sinerja.bkd.kalteng.go.id

Gambar 15 Laman e-Kinerja pada Aplikasi SINERJA



Sumber : sinerja.bkd.kalteng.go.id

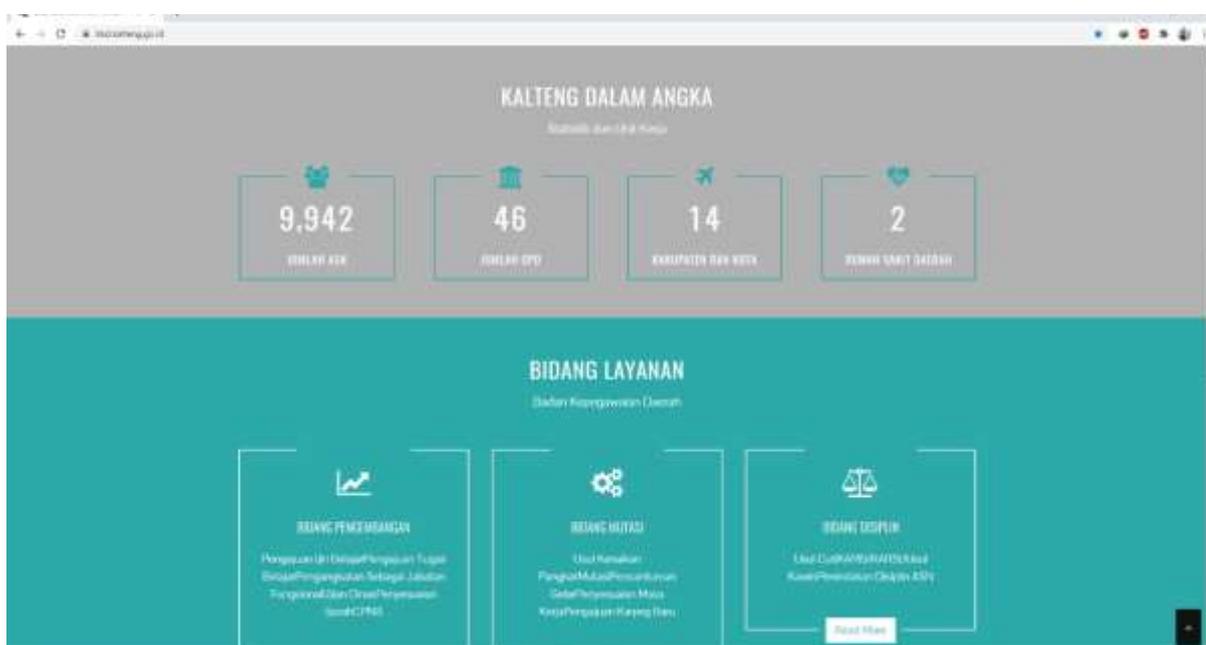
Dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar workshop Aplikasi SINERJA (Sistem Informasi Kinerja) di Aula Computer Assisted Test (CAT) Kantor BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Oktober 2023. Dengan adanya aplikasi ini merupakan suatu implementasi dalam mendukung *E-Government* dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Disiplin dan Bertanggung Jawab.

Aplikasi SINERJA digunakan secara resmi mulai 2 Januari 2024 dan digunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat kedisiplinan ASN. ASN wajib melaksanakan presensi elektronik sesuai dengan ketentuan jam kerja yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun aplikasi SINERJA telah digunakan BKD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu instrument pengumpulan data kinerja yang akan dipergunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

D.5 Website Resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Aplikasi website yang beralamat di bkd.kalteng.go.id yang menampilkan informasi terkait dengan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah baik itu dari bidang kepegawaian maupun informasi-informasi yang mendukung ketercapaian sasaran strategis.

Gambar 16 Tampilan Website BKD Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Sub Bidang Pengolahan Data, BKD 2022

D.6 Pelaksanaan seleksi yang berkaitan dengan pemenuhan kompetensi menggunakan **Computer Assisted Test (CAT)**

Computer Assisted Test didefinisikan sebagai suatu metode ujian dengan menggunakan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian. Protipe sistem CAT mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) Aplikasi menggunakan *platform windows* atau *open source* yang berbasis *website*; (2) Adanya narasi yang berisi petunjuk yang disajikan pada layar monitor komputer; (3) Aplikasi disertai video gerakan mouse untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya, dan (4) Dilengkapi tutorial dan teks yang berisi petunjuk pada layar monitor komputer agar semua peserta tes mudah dalam mengoperasikannya. Publikasi hasil tes dengan metode CAT meliputi publikasi hasil secara langsung bersamaan dengan waktu pelaksanaan tes (*realtime*) melalui layar monitor yang disediakan di ruang monitoring dan ruang tunggu peserta. Selanjutnya publikasi hasil yang diterima oleh peserta pada layar monitor masing-masing komputer peserta. Selain itu, publikasi hasil tes juga dilakukan melalui papan pengumuman yang disediakan oleh panitia penyelenggara.

Gambar 17 Ruang CAT BKD Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Dokumentasi PPID, BKD 2022

Ada beberapa kegiatan pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sistem CAT yaitu : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Asesmen Job Fit, Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II, Seleksi CPNS, serta Asesmen Mutasi bagi ASN yang mengusulkan untuk beralih status kepegawaiannya menjadi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan penilaian terhadap ASN sesuai dengan pemetaan kelembagaan yang diharapkan oleh pemangku kebijakan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin ketersediaan ASN yang professional dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara terencana dan terukur.

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis capaian kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, baik capaian kegiatan maupun sasaran strategis tahun 2023 termasuk akuntabilitas keuangan

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Capaian	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sehubungan dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 serta ditetapkannya kebijakan nasional PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS, serta Penyederhanaan Birokrasi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan ke dalam Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis terkait Manajemen ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun capaian kinerja IKU BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Capaian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

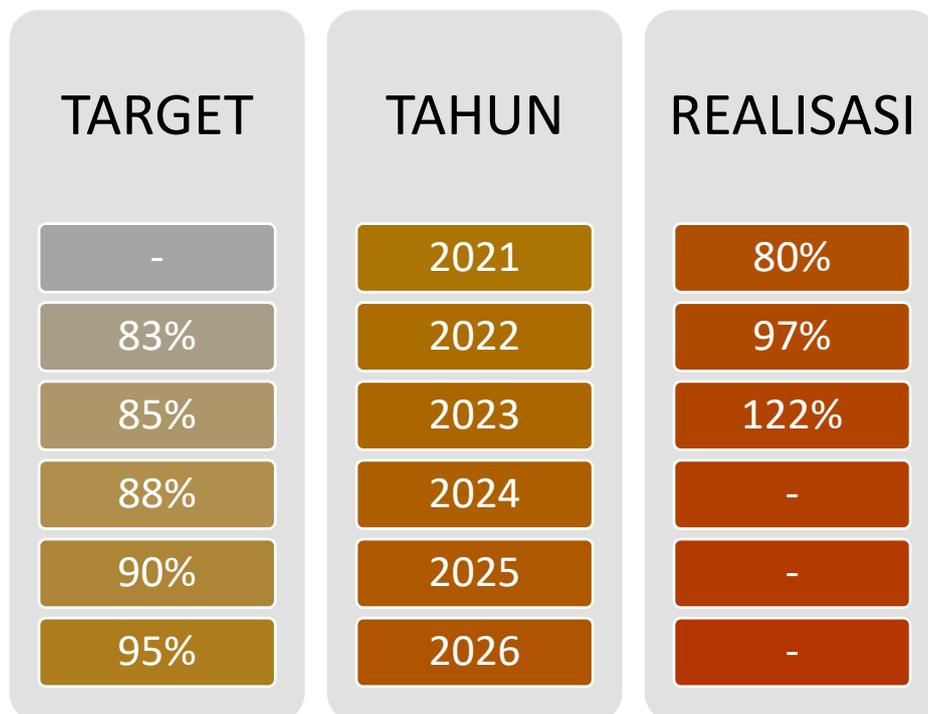
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Awal RPJMD	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian 2023	Kriteria / kode	Target Akhir RPJMD
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayaran Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	83%	85%	122%	143,53%	Sangat Tinggi	95%
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	85%	90%	95%	105,56%	Sangat Tinggi	100%
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	70%	75%	77%	102,67%	Sangat Tinggi	90%
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	65%	70%	100%	142,86%	Sangat Tinggi	85%
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	54	54	51	94,44%	Sangat Tinggi	54
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1006	1010	3189	315,74%	Sangat Tinggi	1017
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	6000	6200	6108	98,52%	Sangat Tinggi	6800
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75.50	76	71,85	94,54%	Sangat Tinggi	78.50

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Awal RPJMD	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian 2023	Kriteria / kode	Target Akhir RPJMD
		Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	0,10%	0,10%	0,10%	100,00%	Sangat Tinggi	0.10%
		Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	80%	85%	98,06%	115,36%	Sangat Tinggi	95%
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	70%	72%	71,30%	99,03%	Sangat Tinggi	75%

Sumber : Data diolah dari Laporan Triwulan BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Berdasarkan data di atas, persentase capaian sasaran strategis BKD Tahun 2023 sebesar **143,53%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah melebihi target sebesar 122%.

Gambar 18 Realisasi Capaian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Adapun uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis perangkat daerah BKD Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

A.1 IKU 1

“Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date”

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengelolaan ASN dan selaku instansi Pembina ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.



Sejak tahun 2018, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengembangkan aplikasi SIM Absensi Terpusat, SIMPEG Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan layanan kepegawaian lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2023 akan dikembangkan layanan e kinerja untuk membantu akselerasi setiap layanan kepegawaian sehingga dapat memberikan kemudahan bagi setiap ASN Provinsi Kalimantan Tengah.

Di sisi lain, hampir seluruh kelembagaan pemerintah Indonesia telah memiliki SIM pengelola data kepegawaian, demikian pula halnya dengan pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menggarap Sistem Informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi. Untuk langkah awal pengintegrasian SI-ASN dilakukan melalui sinkronisasi SIMPEG yang dikelola BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan SAPK yang dikelola oleh BKN.

Untuk menjembatani keberagaman dalam hal pengelolaan data SIMPEG dan sinkronisasi data kepegawaian ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu untuk dilakukan update data ASN secara berkala. Hal ini

bertujuan untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan pengoperasian dan integrasi layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan *up to date*. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan BKD Provinsi Kalimantan Tengah mampu menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah keadaan per tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 9.979 orang. Dengan rincian jumlah PNS sebanyak 9.021 orang dan jumlah PPPK sebanyak 958 pegawai, maka diperlukan manajemen kepegawaian yang baik, dengan prinsip efektif dan efisien yang mendukung terwujudnya good governance dan juga dalam rangka menyajikan informasi kepegawaian tersebut tertuang dalam Rekapitulasi Data Kepegawaian ASN Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023.

Gambar 19 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2023			
1	Per Jenis Kelamin	Jumlah	4.175
	Laki-Laki		4.846
	Perempuan		9.021
	Jumlah Total		
2	Per Golongan Ruang	Jumlah	18
	Golongan I		691
	Golongan II		5.988
	Golongan III		2.324
	Golongan IV		9.021
	Jumlah Total		
3	Per Pendidikan	Jumlah	20
	SD		26
	SLTP		860
	SLTA		768
	Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma		6.309
	S1		1.020
	S2		18
	S3		9.021
	Jumlah Total		
4	Per Eselon	Jumlah	-
	IA		1
	IB		39
	IIA		5
	IIIB		187
	IIIA		70
	I/A		316
	I/B		-
	V		-
	Jumlah Total		618
5	Per Jabatan	Jumlah	2.295
	Fungsional Umum		6.108
	Fungsional Tertentu		618
	Struktural		9.021
	Jumlah Total		
6	Per Usia	Jumlah	41
	21 - 25		412
	26 - 30		868
	31 - 35		1.629
	36 - 40		1.927
	41 - 45		1.670
	46 - 50		1.502
	51 - 55		966
	56 - 60		6
	61 - 65		9.021
	Jumlah Total		
7	JET Penyetaraan	Jumlah	402
	Hasil Penyetaraan		79
	Promosi		31
	Mutasi		44
	Peminjian		258
	Jumlah Total		

JUMLAH PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2023			
1	Per Jenis Kelamin	Jumlah	392
	Laki-Laki		570
	Perempuan		962
	Jumlah Total		

JUMLAH ASN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2023			
1	Per Jenis Kelamin	Jumlah	1
	Laki-Laki		4
	Perempuan		5
	Jumlah Total		

Palangka Raya, 02 Januari 2024

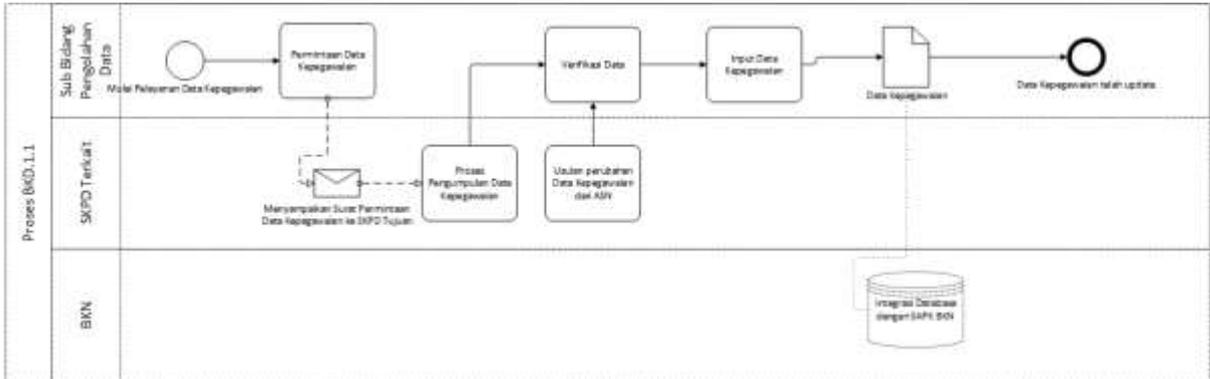
KERALA JABATAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

USDA ANGGYANA, S.Ses.
Jumlah Utama Madise
NIK. 1980901 198911 2 005

Sumber : Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, 2023

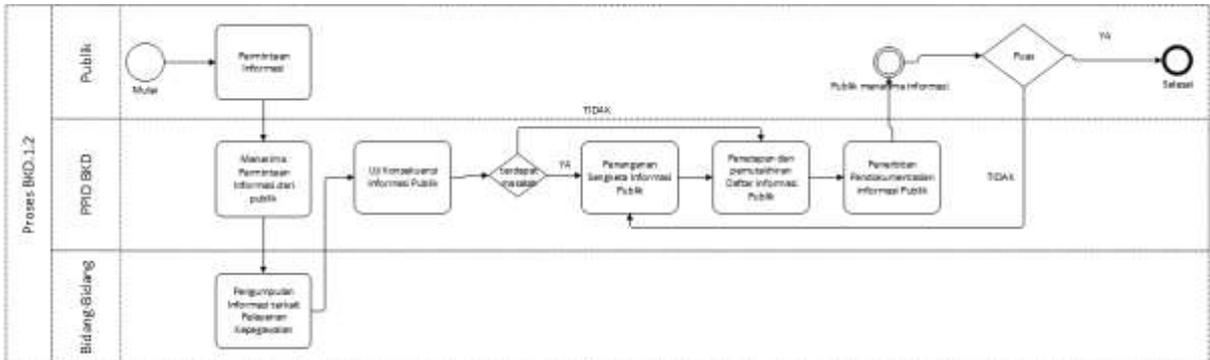
Berikut di bawah ini merupakan proses bisnis dari IKU **Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date.**

Gambar 20 Proses Bisnis Terselenggaranya Pelayanan Data Kepegawaian



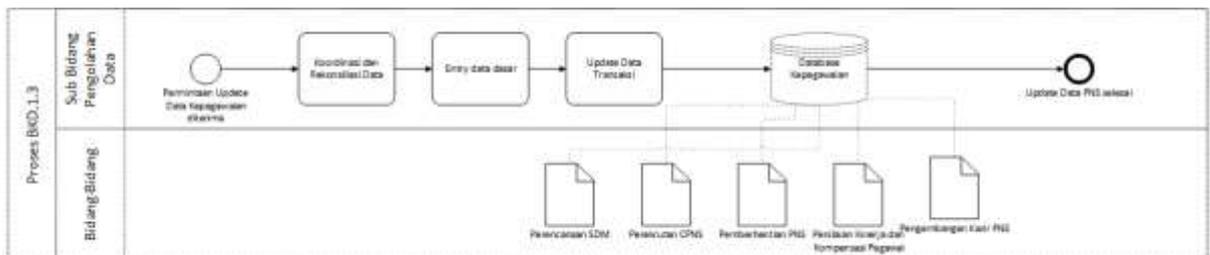
Sumber : Proses Bisnis BKD Prov Kalteng, 2023

Gambar 21 Proses Bisnis Terbangunnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Online dan Terintegrasi



Sumber : Proses Bisnis BKD Prov Kalteng, 2023

Gambar 22 Tersusunnya Data Kepegawaian Berbasis Teknologi yang Diperbaharui Secara Berkala serta Terintegrasi dengan Data Kepegawaian lainnya dalam Sistem Informasi Kepegawaian



Sumber : Proses Bisnis BKD Prov Kalteng, 2023

Indikator Kinerja Utama : **Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date** diukur dengan perbandingan jumlah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diupdate secara berkala setiap triwulan. Berikut disajikan hasil evaluasi atas indikator yang kinerja terdiri dari tabel berikut :

Gambar 23 Realisasi IKU 1 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Tabel 10 Capaian IKU 1 : Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
I	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	90%	95%	105,56% Sangat Tinggi

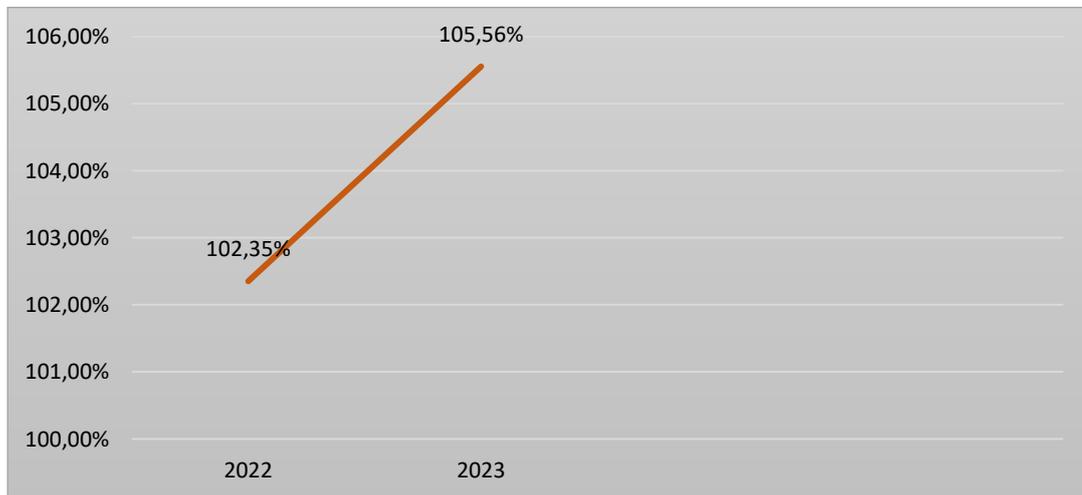
Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Capaian persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date diperoleh dari pengukuran terhadap dua kegiatan utama yaitu pengelolaan data ASN yang terdiri dari kegiatan rekonsiliasi data ASN, peremajaan dan perbaikan data ASN, analisis anomali data ASN, pengelolaan data tabel referensi dan analisis kebutuhan integrasi data kepegawaian, dan untuk penyajian informasi kepegawaian terdiri dari kegiatan penyajian data statistik, dan kerjasama pemanfaatan data ASN.

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date”

adalah sebesar 105.56% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 1 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 24 Grafik Capaian Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date Tahun 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 1 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pengelolaan Data Kepegawaian, yang meliputi :
 - a. Pemutakhiran data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Rekonsiliasi data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Pengembangan SIMPEGDA Kalimantan Tengah
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, yang meliputi :
 - a. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
 - b. Layanan Pengaduan
 - c. Layanan Informasi Kepegawaian melalui media sosial

Gambar 25 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Layanan Informasi Publik



Sumber : Dokumentasi Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, 2023

Realisasi IKU 1 Dengan Target Nasional

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas sebagai supporting staff, mendukung kinerja perangkat daerah lainnya dalam menguatkan dan meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pertimbangan kebijakan kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang Berwenang dalam mengelola Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengelolaan data dan informasi ASN secara tepat, real time, cepat dan mudah diakses, menjadi suatu keharusan. Data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikelola oleh BKD sebagai database Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dimana data tersebut menjadi acuan dalam proses layanan kepegawaian oleh seluruh Instansi. Satu basis data untuk semua aplikasi sedang diterapkan untuk pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanahkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adapun Indikator Kinerja dari Badan Kepegawaian Negara yang terkait dengan IKU 1 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu **IKU 6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN**. Adapun target dari BKN yaitu sebesar 95%.

Gambar 26 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam Menerapkan Manajemen ASN	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK	40%
	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	100%
Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan BKN	88,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN	88,5
Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN	100%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN	95%
Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital	85%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian kepegawaian yang Ditindaklanjuti	85%
Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN BKN	80
	Indeks Maturitas SPBE BKN	3,5
	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	82
	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	79
	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP

Sumber : LKj BKN, 2022

Indikator ini menggambarkan integrasi sistem informasi kepegawaian instansi pemerintah dengan SIASN yang dilakukan melalui tools web service ataupun melalui pemanfaatan aplikasi simpegnas (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional) dalam rangka mewujudkan keterhubungan data ASN antara instansi pemerintah dan BKN.

Dalam rangka melaksanakan integrasi melalui web service dilakukan survey maturitas SIMPEG sesuai dengan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor : 12296/B-Si.01.02/SD/E/2022 tanggal 05 April 2022 untuk mengetahui kondisi aktual pengelolaan aplikasi SIMPEG pada masing-masing instansi pusat dan atau daerah. Survei maturitas SIMPEG ini

dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yang merupakan turunan dari variabel yang sudah ditentukan dengan bobot yang sama. Variabel yang dijadikan dasar penilaian ada 4 (empat), yaitu 1) Sumber Daya Manusia, 2) Teknologi, Sistem Informasi dan Data, 3) Organisasi dan 4) Proses.

Berdasarkan hasil survei maturitas simpeg tersebut, SIMPEG yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah berada dalam kategori **Level 3 (Baik)**. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah mampu mencapai realisasi data kepegawaian Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi sebesar **95%** sesuai dengan target nasional pada IKU Badan Kepegawaian Negara.

Gambar 27 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Dokumentasi Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, 2023

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Dari sisi pencapaian kinerja tidak mengalami kendala yang cukup berarti. BKD Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif berupaya untuk meningkatkan fungsi sistem informasi yang ada untuk mendukung (i) pengelolaan data kepegawaian yang lengkap dan diperbarui; (ii) pelayanan dan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan administrasi kepegawaian. Namun terdapat permasalahan yang telah dilaporkan secara berkala serta solusi pemecahan masalah oleh bidang teknis dirangkum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11 Identifikasi Permasalahan pada IKU 1

NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ KENDALA	REKOMENDASI
1.	PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA	Keterlambatan approval dari pihak BKN terkait peremajaan Data	Pihak BKD harus proaktif dalam follow up data pegawai ke BKN
			Adanya call center dari pihak BKN khusus untuk BKD/BKPSDM Kabupaten Kota dan Provinsi dalam menangani peremajaan Data
2.	PERBAIKAN DATA	Aplikasi SIASN sering rollback/ data kembali ke kondisi awal meskipun setelah dilakukan perubahan data	Adanya perbaikan sistem SIASN agar permasalahan dimaksud tidak terjadi kembali

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan BKD 2023

A.2 IKU 2 “Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi”

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah. Mengingat begitu pentingnya SDM Aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam Reformasi Birokrasi aspek SDM Aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis.

Gambar 28 Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

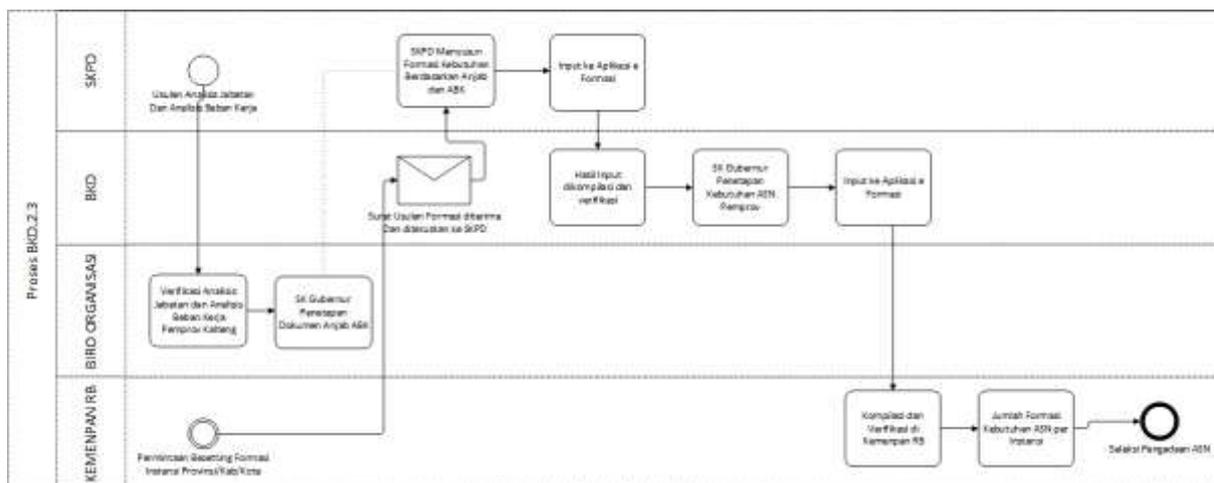


Sumber : Dokumentasi Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, 2023

Salah satu program reformasi birokrasi nasional adalah penataan jumlah, distribusi, dan kualitas Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka perencanaan kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mewujudkan jumlah dan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah serta untuk menjamin distribusi Pegawai Negeri Sipil yang proporsional maka diperlukan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun wajib melaksanakan proses penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai, dengan memperhitungkan kebutuhan dan jumlah PNS yang pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melakukan penghitungan kebutuhan pegawai dilakukan dengan cara menganalisis persediaan pegawai dan menghitung kebutuhan pegawai. Berikut di bawah ini merupakan proses bisnis dari IKU **Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi**.

Gambar 29 Proses Bisnis Tersedianya Perencanaan Kebutuhan ASN



Sumber : Proses Bisnis BKD Prov Kalteng, 2023

Indikator Kinerja Utama : **Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi** diukur dengan perbandingan jumlah formasi jabatan yang sudah terisi dengan jumlah kebutuhan pegawai. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas indikator yang kinerja terdiri dari tabel berikut :

Gambar 30 Realisasi IKU 2 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

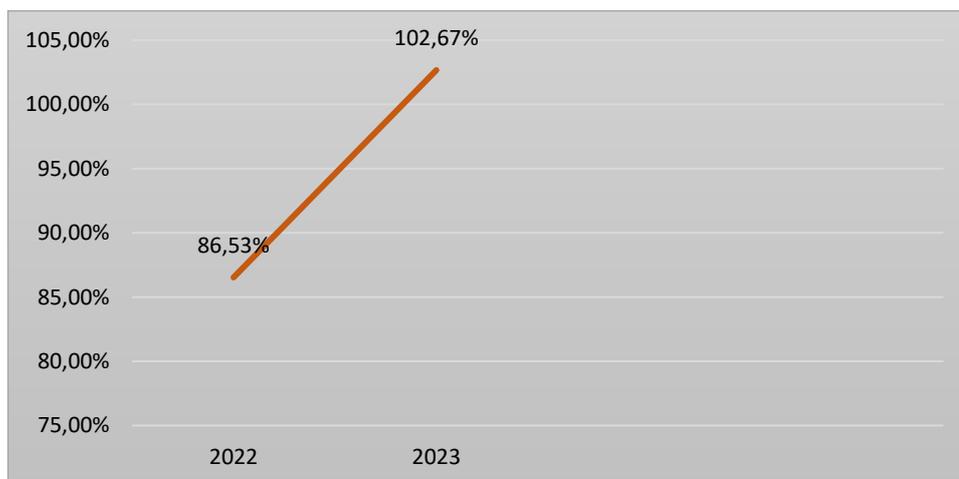
Tabel 12 Capaian IKU 2 : Persentase Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Instansi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
II	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	75%	77%	102,67% Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi” adalah sebesar 102.67% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 2 per triwulan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 31 Grafik Capaian Persentase Pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi Tahun 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Dari hasil grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan pertambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 2 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, yang meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
 - b. Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional tenaga Kesehatan dengan Alokasi kebutuhan formasi sebanyak **1.495** yang terdiri dari **1.379 formasi PPPK JF Guru**, dan **116 formasi JF Tenaga Kesehatan**.

Kemudian berdasarkan pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 800/434/II.1/BKD tentang **Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023**, telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal **14 November s.d. 2 Desember 2023**, telah diperoleh hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023. Hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional

Guru Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023, telah diperoleh pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru sejumlah 1.056 orang dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sejumlah 93 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13 Rekapitulasi Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahun 2023

No	Jabatan PPPK	Lulus	Tidak Lulus
1	Guru	1056	543
2	Tenaga Kesehatan	93	152
	Total Jumlah Peserta	1149	695

Sumber : Laporan Kegiatan Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, Bidang Pengembangan

Gambar 32 Pelaksanaan Tes Kompetensi PPPK Tahun 2023 yang bertempat di Gedung CAT UPT BKN Palangka Raya

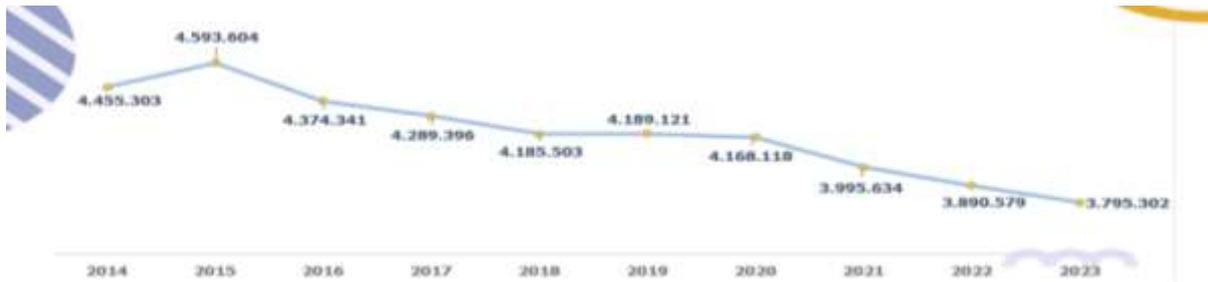


Sumber : Laporan Kegiatan Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, Bidang Pengembangan

Realisasi IKU 2 Dengan Target Nasional

Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Manajemen ASN yang menjelaskan bahwa Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Gambar 33 Pergerakan Jumlah PNS di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir



Sumber : Buku Statistik Semester I Tahun 2023, BKN

Pada grafik di atas menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus aktif sampai dengan Semester I Tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 2% dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun 2022. Kemudian pada data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PNS dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena rekrutmen ASN mengalami moratorium selama beberapa tahun terakhir.

Gambar 34 Persentase Kebutuhan ASN secara Nasional



Sumber : Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2024, Kementerian PAN dan RB RI

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan instansi pemerintah dan penetapan formasi terhadap kebutuhan nasional pada tahun 2021-2023 hanya berada pada kisaran 40-55%. Jika dibandingkan dengan target dan capaian Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas rata-rata capaian nasional.

Tabel 14 Persentase Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023

TAHUN	KEBUTUHAN DAERAH	USULAN INSTANSI DAN PENETAPAN FORMASI	PESERTA LULUS
2022	1.746	1.065 (61%)	1.053 (98%)
2023	1.942	1.495 (77%)	1.149 (77%)

Sumber : Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Bidang Pengembangan

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Namun dalam menjalankan kegiatan manajemen ASN yang berkaitan dengan pencapaian IKU 2 ini masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 15 Identifikasi Permasalahan pada IKU 2

NO	URUSAN	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN	Kualitas database pegawai masih belum memenuhi standar sebagai basis dalam melakukan analisa penataan pegawai ASN sesuai formasi dan kebutuhan serta untuk pengembangan kompetensi ASN	Penataan pegawai belum sesuai dengan formasi dan kebutuhan dalam jabatan Pengembangan kompetensi ASN yang kurang tepat sasaran

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan BKD 2023

Adapun upaya yang telah dilakukan BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi permasalahan dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan

Penyempurnaan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sehingga sistem informasi pengelolaan kepegawaian memuat data yang terintegrasi dengan data lainnya (khususnya data pemetaan kompetensi dan penilaian kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem Manajemen Talenta.

2. Penguatan manajemen ASN dengan menetapkan beberapa Peraturan Kepala Daerah :

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Kebutuhan Dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Redistribusi ASN sesuai dengan kompetensi.

A.3 IKU 3

“Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal”

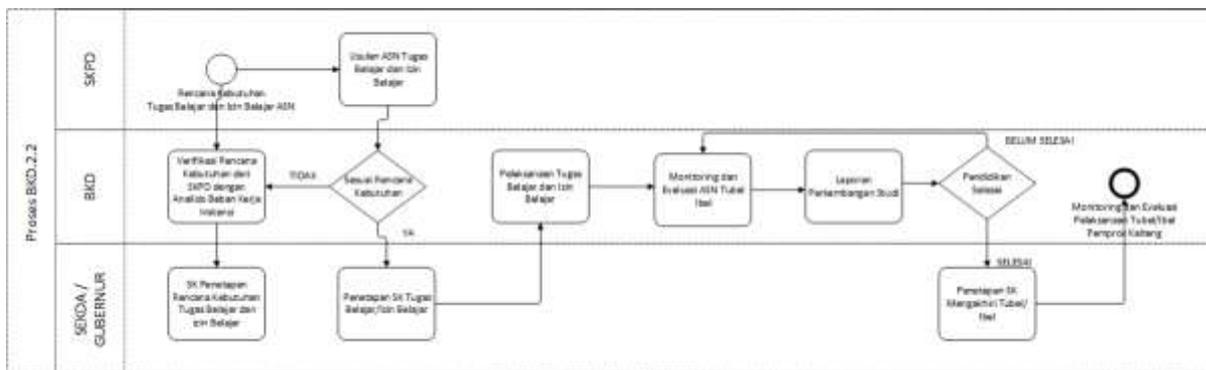
Untuk IKU 3 : **Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal** direalisasikan dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yaitu pengelolaan pendidikan lanjutan ASN melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS.

Dengan adanya tugas belajar dan izin belajar akan memberi kesempatan kepada PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pendidikan yang akan sekaligus membantu dalam meniti karier. Pendidikan menjadi salah satu dasar menentukan grading tunjangan dan juga pertimbangan mutasi/promosi.

Adapun kegiatan pendukung IKU 3 ini dilakukan untuk menyeleksi PNS yang berhak untuk melakukan tugas belajar dan melihat kelengkapan administrasi untuk tugas belajar dari masing-masing penerima tugas belajar. Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai perkembangan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada pada Instansi Provinsi Kalimantan Tengah. Dasar hukum pemberian Tugas Belajar maupun Izin Belajar tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut di bawah ini merupakan proses bisnis dari IKU **Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**.

Gambar 35 Proses Bisnis Terfasilitasinya Pendidikan Lanjutan ASN



Sumber : Proses Bisnis BKD Prov Kalteng, 2022

Indikator Kinerja Utama : **Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal** diukur dengan perbandingan jumlah ASN yang melanjutkan pendidikan tugas belajar dan izin belajar dengan jumlah kebutuhan tugas belajar dan izin belajar instansi. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas indikator yang kinerja terdiri dari tabel berikut :

Gambar 36 Realisasi IKU 3 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

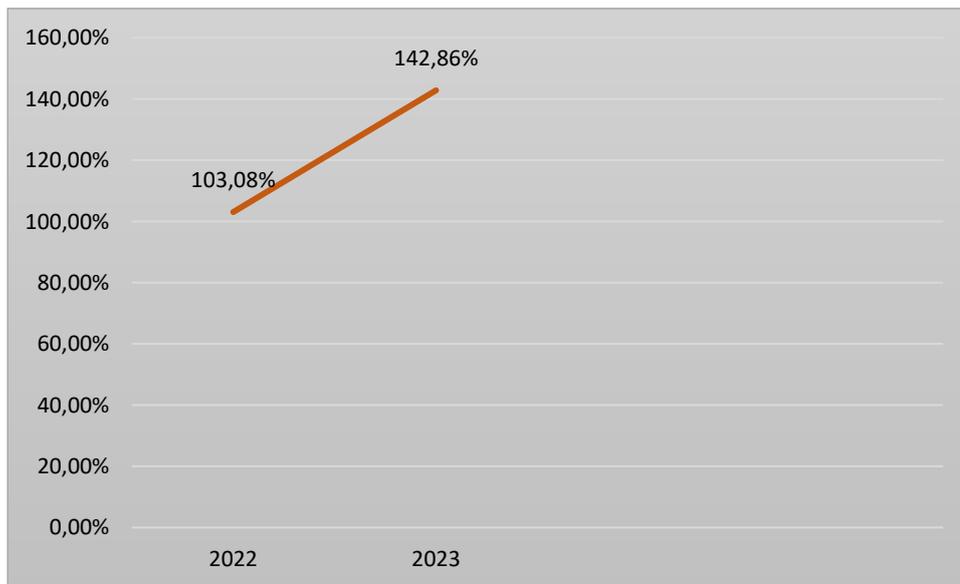
Tabel 16 Capaian IKU 3 : Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
III	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase	70%	100%	142,86% Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja 2022, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal” adalah sebesar 142,86% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 3 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 37 Grafik Capaian Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Dari hasil grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Realisasi IKU 3 Dengan Target Nasional

Untuk Indikator Kinerja Utama Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak memiliki target secara nasional. Hal ini dikarenakan IKU 3 merupakan capaian kinerja dalam perspektif *internal process*.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 3 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, yang meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Seleksi dan Monitoring Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Dari sisi pencapaian kinerja sudah tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun terdapat permasalahan yang telah dilaporkan secara berkala yaitu ASN yang ingin melanjutkan Pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar sering terlambat melakukan pengurusan berkas usul SK Tugas Belajar atau SK Izin Belajar, kebanyakan yang terjadi pengusul sudah dalam proses perkuliahan baru mengajukan usul ke BKD. Solusi yang dilakukan oleh bidang teknis selama tahun berjalan yaitu memberikan pengarahan kepada bagian kepegawaian SOPD pengusul untuk lebih proaktif dalam menangani hal dimaksud. Hal ini bertujuan agar SK Tugas Belajar maupun SK Izin Belajar dapat diterima oleh ASN tepat waktu.

A.4 IKU 4

“Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah”

Gambar 38 Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran saat melantik dan mengambil Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan



Sumber : Dokumentasi Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, 2023

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan

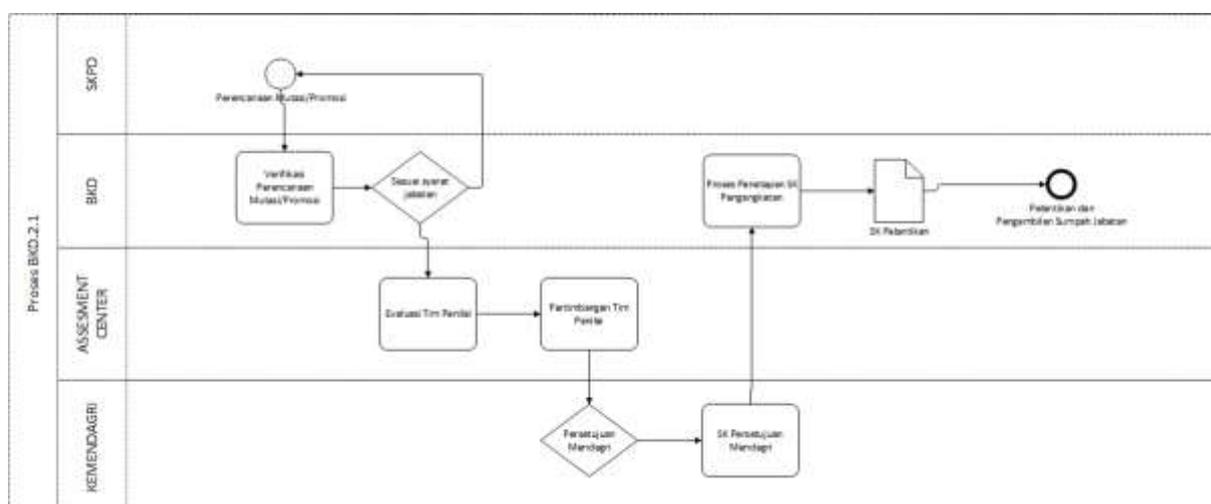
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional. Hal ini tentunya sejalan dengan Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi harus pula memperhatikan 9 (sembilan) sistem merit, meliputi kriteria:

1. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
3. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
4. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
5. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
6. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
7. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
8. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
9. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Adapun tujuan dari IKU 4 adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. Sehingga dengan adanya keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan sistem merit akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah instansi provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut di bawah ini merupakan proses bisnis dari IKU Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah.

Gambar 39 Proses Bisnis Ditematkannya JPT dan JA



Sumber : Proses Bisnis BKD Prov Kalteng, 2023

Indikator Kinerja Utama : Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah diukur dengan Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas indikator yang kinerja terdiri dari tabel berikut :

Gambar 40 Realisasi IKU 4 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Tabel 17 Capaian IKU 4 : Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
IV	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	54	51	94,44% Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

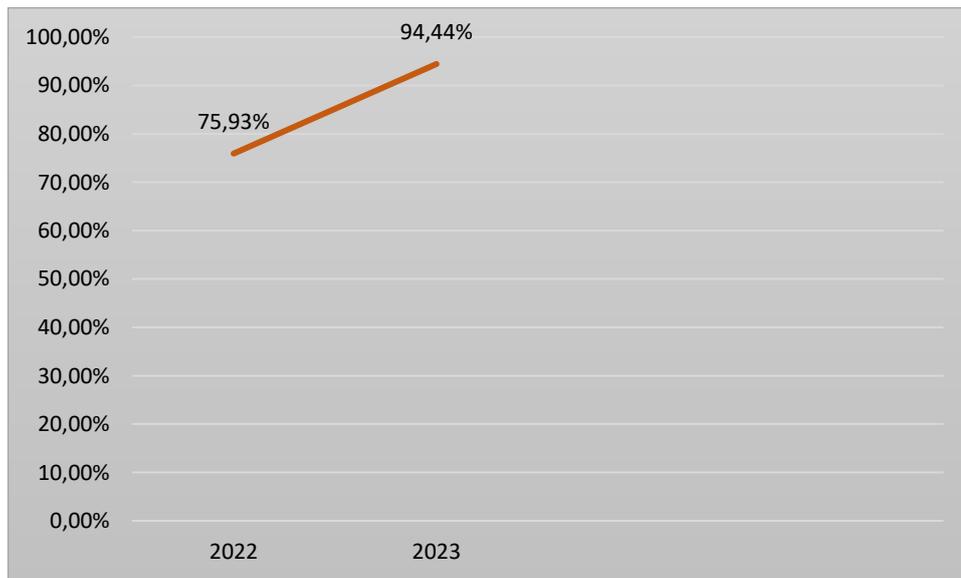
Gambar 41 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 28 Agustus 2023



Sumber : Dokumentasi Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, 2023

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah” adalah sebesar 94,44% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 4 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 42 Grafik Capaian Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Dari hasil grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 4 dilaksanakan dalam bentuk Pengelolaan Promosi ASN, yang meliputi :

1. Seleksi Terbuka JPT Madya dan JPT Pratama
2. Job Fit

Gambar 43 Seleksi Job Fit Eselon II Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



Sumber : PPID BKD Prov Kalteng, 2023

Realisasi IKU 4 Dengan Target Nasional

Gambar 44 ASN di Indonesia berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2023



Sumber : Buku Statistik Semester I Tahun 2023, BKN

Penerapan sistem merit sebagai dasar dalam manajemen kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, memberikan harapan bagi terwujudnya pengelolaan Aparatur Sipil Negara secara akuntabel, transparan, dan professional. Keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan hasil dari penerapan sistem merit telah mencapai kinerja sebesar 99.44%. Hal ini masih perlu peningkatan lagi mengingat keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang ideal perlu mencapai target 100%.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Pelaksanaan seleksi terbuka dalam rangka mengisi jabatan Pimpinan Tinggi sampai dengan saat ini memang disadari mengandung beberapa problematika yang seringkali menyulitkan bagi Pemerintah Daerah. Pertama, seleksi terbuka memerlukan anggaran yang relatif besar. Perhelatan seleksi terbuka paling tidak memerlukan alokasi anggaran konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara, anggaran untuk honor Panitia Seleksi (Pansel), biaya untuk assessor kompetensi bersertifikat, biaya makan minum dalam pelaksanaan seleksi, dan biaya untuk sewa ruangan (jika peserta seleksi terbuka relatif banyak). Kedua, seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi perlu waktu lama. Dalam proses seleksi terbuka memang mengkonsumsi waktu relatif lama mulai dari pengumuman seleksi awal, pengujian kelengkapan administrasi, penulisan makalah, presentasi makalah, assessment oleh Assessor bersertifikat, pengujian rekam jejak, wawancara, sampai dengan wawancara akhir. Setidaknya diperlukan waktu 20 (dua puluh) hari untuk melakukan proses seleksi sampai diperolehnya calon peserta yang akan ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi untuk mengisi jabatan kosong.

Untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek berikut :

Pengembangan Karier

- 1) Memperbarui penilaian kompetensi secara berkala sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis
- 2) Implementasi pedoman Manajemen Talenta instansi sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3/2020, diselenggarakan berdasarkan tahapan dan indikator yang terukur (khususnya aspek potensial) sehingga tersusun rencana suksesi untuk setiap jabatan
- 3) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non-klasikal

Promosi dan Mutasi

- 1) Implementasi secara konsisten kebijakan pedoman pola karier instansi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai acuan dalam pengembangan karir (pengisian jabatan) yang selaras dengan sistem Manajemen Talenta.

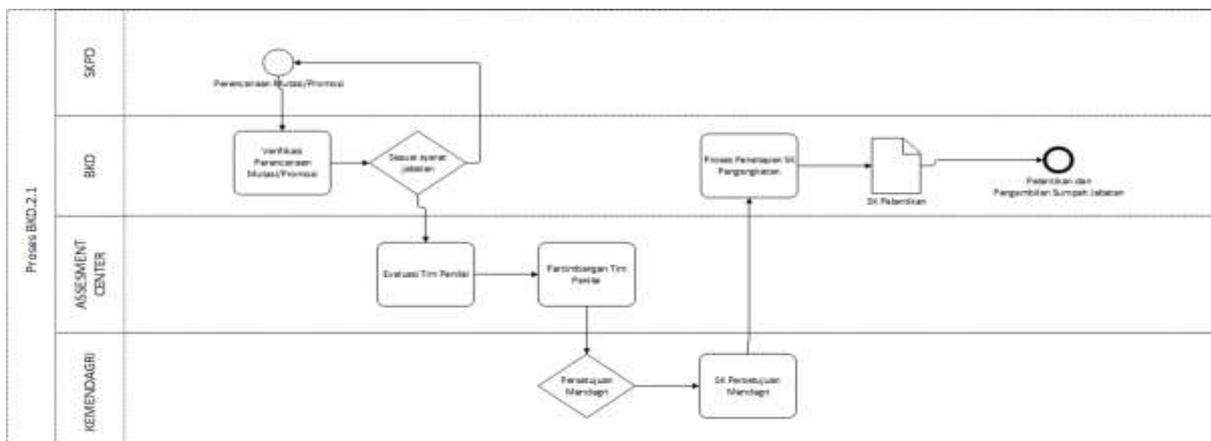
A.5 IKU 5

“Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah”

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri atas: jabatan administrator; jabatan pengawas; dan jabatan pelaksana.

Adapun tujuan dari IKU 5 adalah menempatkan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada jabatan Administrasi sesuai dengan kompetensi. Sehingga dengan adanya keterisian Jabatan Administrasi sesuai dengan sistem merit akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah instansi provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pencapaian sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut di bawah ini merupakan proses bisnis dari IKU **Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah**.

Gambar 45 Proses Bisnis Ditempatkannya JPT dan JA



Sumber : Proses Bisnis BKD Prov Kalteng, 2022

Indikator Kinerja Utama : **Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah** diukur dengan Jumlah Jabatan Administrasi yang terisi pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas indikator yang kinerja terdiri dari tabel berikut :

Tabel 18 Capaian IKU 5 : Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
V	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	1010	3189	315,74% Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja 2022, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

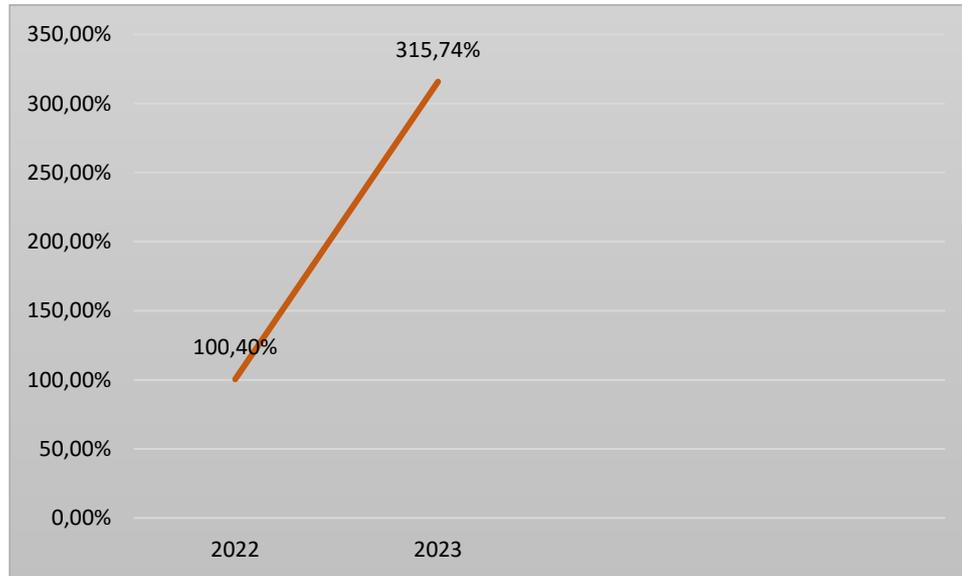
Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah” adalah sebesar 315,74% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 4 dalam target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 46 Realisasi IKU 5 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Gambar 47 Grafik Capaian Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Dari hasil grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan. Kemudian dari sisi pencapaian kinerja juga tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 5 dilaksanakan dalam bentuk Pengelolaan Promosi ASN, yang meliputi :

1. Job Fit
2. Promosi Jabatan Struktural

Gambar 48 Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalteng Tahun 2023



Sumber : PPID BKD Prov Kalteng, 2023

Realisasi IKU 5 Dengan Target Nasional

Untuk Indikator Kinerja Utama Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah tidak memiliki target secara nasional. Hal ini dikarenakan IKU 5 merupakan capaian kinerja dalam perspektif *internal process*.

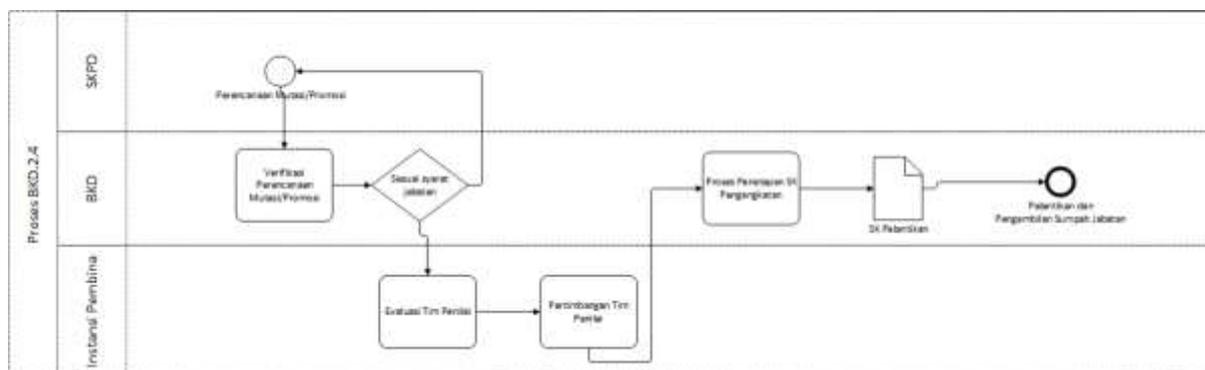
A.6 IKU 6

“Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Adapun tujuan dari IKU 6 adalah menempatkan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada jabatan Fungsional sesuai dengan kompetensi. Sehingga dengan adanya keterisian Jabatan Fungsional sesuai dengan sistem merit akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah instansi provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pencapaian sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut di bawah ini merupakan proses bisnis dari IKU **Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah**.

Gambar 49 Proses Bisnis Terselenggaranya pengelolaan karir ASN dalam jabatan fungsional sesuai sistem merit



Sumber : Proses Bisnis BKD Prov Kalteng, 2022

Indikator Kinerja Utama : **Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah** diukur dengan Jumlah Jabatan Fungsional yang terisi pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas indikator yang kinerja terdiri dari tabel berikut :

Tabel 19 Capaian IKU 6 : Jumlah Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
VI	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	6200	6108	98,52% Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja 2022, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

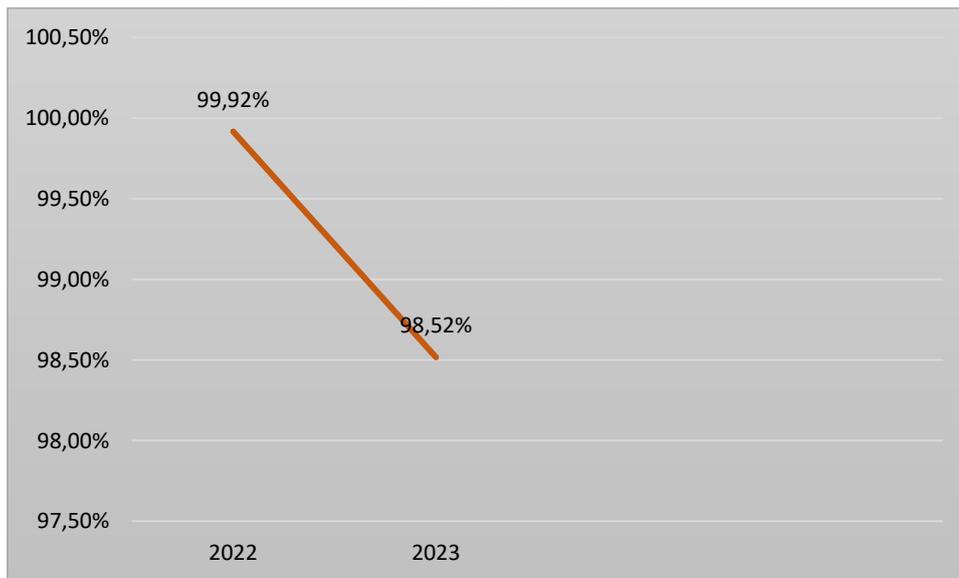
Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah” adalah sebesar 98,52% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 6 sesuai dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 50 Realisasi IKU 6 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

TARGET	TAHUN	REALISASI
-	2021	5800
6000	2022	5995
6200	2023	6108
6400	2024	-
6600	2025	-
6800	2026	-

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Gambar 51 Grafik Capaian Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Dari hasil grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah masih dikategorikan sangat tinggi walaupun mengalami penurunan capaian sebesar 1,4%.

Gambar 52 Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Fungsional lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



Sumber : PPID BKD Prov Kalteng, 2023

Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah melantik serta mengukuhkan sebanyak 60 orang Pejabat Fungsional dari 18 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari fungsional pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, ataupun melalui penyetaraan jabatan. Selain itu, juga dikukuhkan para Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian yang nomenklturnya berubah menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. Kemudian pada tanggal 22 November 2023 juga telah dilaksanakan pelantikan 149 Pejabat Fungsional di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bajenta Lantai 3 Gedung Diklat RSUD dr. Doris Sylvanus. Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari Dokter, Perawat, Bidan, Petugas Kerahasiaan Rekam Medis, dan Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya (TKPL).

Realisasi IKU 6 Dengan Target Nasional

Untuk Indikator Kinerja Utama Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah tidak memiliki target secara nasional. Hal ini dikarenakan IKU 6 merupakan capaian kinerja dalam perspektif *internal process*.

Gambar 53 Kepala BKD Prov Kalteng membacakan Sumpah Janji Jabatan diikuti oleh ASN yang dilantik pada RSUD dr. Doris Sylvanus



Sumber : PPID BKD Prov Kalteng, 2023

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Namun dalam menjalankan kegiatan manajemen ASN yang berkaitan dengan pencapaian IKU 6 ini masih menghadapi beberapa permasalahan beserta rekomendasi penyelesaian yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 20 Identifikasi Permasalahan pada IKU 6

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI PENYELESAIAN
1	Pengelolaan Jabatan Fungsional yang kebijakannya masih menyesuaikan dari Instansi Pembina masing-masing	Adanya kebijakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional
2	Masih banyak ASN yang belum paham mengenai Aplikasi DISPAKATI BKN mengenai penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.	Perlu adanya pendampingan dari BKN

Sumber : Data diolah dari notulen rapat dan Laporan Triwulan Kinerja, 2023

A.7 IKU 7 “Indeks Profesionalitas ASN”



Indeks Profesionalitas diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin. Adapun indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi (bobot 25%)
Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-1 (Diploma-Satu)/SLTA Sederajat;
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.
2. Kompetensi (bobot 40%)
Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional;
 - c. Diklat Teknis;
 - d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara
3. Kinerja (bobot 30%)
Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku Kerja.
4. Disiplin (bobot 5%)
Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat).

Pada Tahun 2023, BKD menargetkan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 75.50. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh BKN terhadap 9.642 pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan metode perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman

Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh nilai indeks sebesar 71.86 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Dimensi	Bobot per Dimensi	Rata-Rata Capaian Per Dimensi
1	Kualifikasi	25%	12.63%
2	Kompetensi	40%	32.93%
3	Kinerja	30%	25.04%
4	Disiplin	5%	4.99%
	Nilai Akhir Indeks		71.86%

Sumber : Data diolah dari SAPK BKN, 2023

Tabel 22 Capaian IKU 7 : Indeks Profesionalitas ASN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
VII	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,00	71,86	94,54% Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

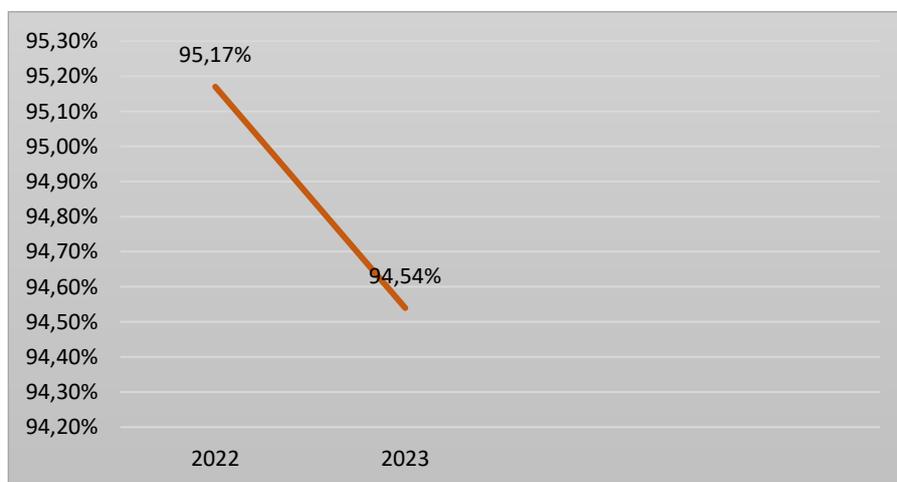
Apabila dibandingkan dengan target capaian pada tahun 2023 sebesar 76.00%, capaian kinerja untuk perolehan nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 94,54% dari target dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Gambar 54 Realisasi IKU 7 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Gambar 55 Grafik Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja pada indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2021-2023.

Tabel 23 Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2023

No	Indikator kinerja	Realisasi (%)			Perubahan (%)	Keterangan
		2021	2022	2023		
1	Indeks Profesionalitas ASN	74.68	71.86	71.85	-1.01	menurun
	Kualifikasi	12.63	12.63	12.63	0	tetap
	Kompetensi	33.99	32.93	31.93	-1.00	menurun
	Kinerja	25.04	25.04	25.04	0	tetap
	Disiplin	4.98	4.99	4.99	0.01	meningkat

Sumber : Data diolah dari SIASN BKN, 2023

Realisasi IKU 7 Dengan Target Nasional

Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana di dalamnya memberi mandat untuk mewujudkan ASN/PNS yang

Profesional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Renstra Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 yang di dalamnya juga tertuang tentang perlunya melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di instansi pemerintahan. Juga berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menyatakan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya

Tabel 24 Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Nasional	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	IP ASN	71,85	100	71,85%

Sumber : Data diolah dari SIASN BKN, 2023

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 memiliki target indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) 76,00 dan dapat terealisasi dengan nilai 71,85. Hal ini berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai Indeks Profesionalitas ASN ini termasuk dalam kategori “Sedang”. Jika dilihat dari target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 94,54%, target yang ditetapkan tersebut tidak dapat terealisasi secara penuh karena terkendala beberapa faktor. Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN antara lain :

- 1) Masih adanya PNS yang belum berpendidikan Sarjana/ sederajat (S1/D4) yaitu sebanyak 1.674 orang, hal ini sangat berpengaruh kepada poin penilaian kualifikasi pendidikan;
- 2) Masih adanya PNS yang tidak menyampaikan penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) yang diwajibkan setiap tahunnya, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya penilaian pada poin kinerja;
- 3) Masih kurangnya PNS yang menduduki jabatan struktural mengikuti diklat yang bersesuaian dengan level jabatannya, hal ini terjadi karena tidak didukung oleh anggaran yang cukup; dan
- 4) Masih kurangnya PNS yang mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis sesuai dengan bidangnya karena terkendala biaya dan juga tidak terdapat dukungan anggaran dari pemerintah.

Adapun program yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan IP ASN yaitu :

- 1) Memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan PNS melalui Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di luar Provinsi.
- 2) Memfasilitasi PNS dengan memaksimalkan pelayanan bagi setiap PNS yang mengurus Izin Belajar maupun Tugas Belajar.
- 3) Intensifikasi kewajiban penyampaian laporan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

A.8 IKU 8 “Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN”

BKD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BKD Provinsi Kalimantan Tengah memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang merupakan kewenangan pejabat eselon I, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Gubernur.



BKD menerima laporan hasil pemeriksaan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan disertai usulan penjatuhan hukuman disiplin dari para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila dari laporan Kepala SKPD tersebut penjatuhan hukuman disiplinnya merupakan kewenangan Sekda atau Gubernur, maka BKD menindaklanjuti dengan memproses penetapan keputusan Sekda dan Gubernur tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memudahkan memahami tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin dapat memperhatikan alur sebagai berikut:

Gambar 56 Alur Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin



Sumber : Data diolah berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yaitu **I'DIS BKN** yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung ketercapaian indikator ini, BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring kehadiran pegawai melalui absensi elektronik;
- b. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai;
- c. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar workshop Aplikasi SINERJA (Sistem Informasi Kinerja) di Aula Computer Assisted Test (CAT) Kantor BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Oktober 2023. Dengan adanya aplikasi ini merupakan suatu implementasi dalam mendukung *E-Government* dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Disiplin dan Bertanggung Jawab.

Gambar 59 Kepala BKD Prov. Kalteng memberikan arahan kepada peserta workshop aplikasi SINERJA



Sumber : Data diolah dari PPID BKD Prov. Kalteng, 2023

Aplikasi SNERJA merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi ASN diwajibkan presensi dengan menggunakan aplikasi SNERJA melalui web <https://sinerja.bkd.kalteng.go.id>.

Gambar 60 Penyampaian Materi Workshop Aplikasi SNERJA



Sumber : Data diolah dari PPID BKD Prov. Kalteng, 2023

Aplikasi SNERJA digunakan secara resmi mulai 2 Januari 2024 dan digunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat kedisiplinan ASN. ASN wajib melaksanakan presensi elektronik sesuai dengan ketentuan jam kerja yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengadakan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Kinerja dan Penilaian Kinerja Pegawai menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN pada tanggal 31 Oktober 2024, bertempat di Aula BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Gambar 61 Pelaksanaan Sosialisasi E-Kinerja BKN Tahun 2023



Sumber : Data diolah dari PPIID BKD Prov. Kalteng, 2023

aplikasi e-Kinerja ini adalah bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Kegiatan ini juga diselenggarakan untuk menindaklanjuti SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN sesuai amanah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai. Dengan penggunaan aplikasi e-Kinerja diharapkan dapat mendukung pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah karena telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) BKN. ASN dapat menyusun SKP Tahun 2023 melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BKN. Dengan adanya aplikasi yang dikembangkan BKN memudahkan dalam pelaporan SKP tiap ASN.

Pada Tahun 2023, BKD Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sebesar 0.10%. Adapun rincian jumlah pelanggaran disiplin pada tahun 2021 s.d. tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25 Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2023

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Keputusan Hukuman Disiplin Pada Tahun			Jumlah Perubahan	Keterangan Perubahan 2022-2023
		2021	2022	2023		
1	Ringan	7	5	5	0	Tetap
2	Sedang	5	4	3	1	Penurunan
3	Berat	9	8	7	1	Penurunan
	Jumlah	21	17	15	2	Penurunan

Sumber : Data diolah dari Bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Prov Kalteng, 2023

Indikator Kinerja Utama : **Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN** diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun } (n-1)} \times 100 \% \right) \\
 &\text{dikurangi} \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun } (n)}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun } (n)} \times 100 \% \right) \\
 &= \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun } (2021)}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun } (2021)} \times 100 \% \right) \\
 &- \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun } (2022)}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun } (2022)} \times 100 \% \right) \\
 &= \left(\frac{17}{9462} \times 100 \% \right) - \left(\frac{15}{9021} \times 100 \% \right) \\
 &= 0.01
 \end{aligned}$$

Tabel 26 Capaian IKU 8 : Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023(%)
VIII	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	0.01	0.01	100.00% Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

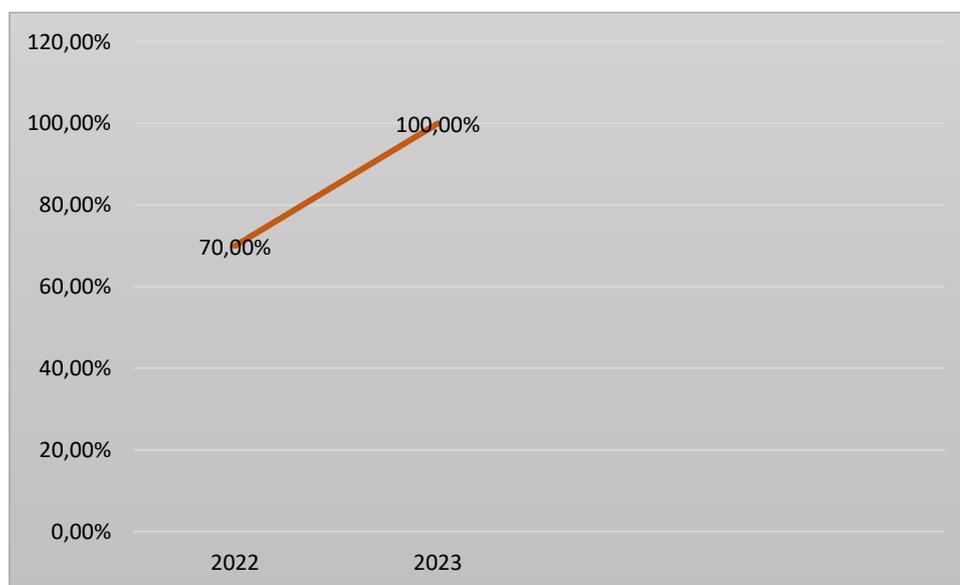
Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN” adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 8 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 62 Realisasi IKU 8 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

TARGET	TAHUN	REALISASI
-	2021	-
0,1%	2022	0,07%
0,1%	2023	0,1%
0,1%	2024	-
0,1%	2025	-
0,1%	2026	-

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Gambar 63 Grafik Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Dari penjabaran diatas, berdasarkan perhitungan target dan realisasi, dapat disimpulkan bahwa capaian untuk indikator kinerja persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD yang menjadi Kewenangan BKD berada pada kategori Sangat Tinggi. Faktor pendorong terealisasinya indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kesadaran PNS terhadap disiplin pegawai salah satunya karena adanya penerapan *reward* dan *punishment* bagi pegawai berdasarkan penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya tentang penerapan disiplin terkait jam kerja

pegawai. Disebutkan bahwa Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian maupun penyempurnaan kebijakan *reward and punishment* melalui sistem e Kinerja ASN, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian target pada indikator persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin yang menjadi Kewenangan BKD sampai dengan akhir periode RPJMD.

Realisasi IKU 8 Dengan Target Badan Kepegawaian Negara

Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh BKN sebagai salah satu cara menciptakan manajemen ASN yang profesional.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, BKN berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Sebagai wujud implementasi amanat tersebut, sejak tahun 2020 BKN melakukan sejumlah agenda pengawasan dan pengendalian dalam rangka memastikan seluruh rangkaian proses manajemen ASN diterapkan sesuai regulasi yang ada. Adapun agenda pengawasan dan pengendalian tersebut diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap: Netralitas ASN, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ASN Tipikor, dan Tindak Lanjut Audit Permasalahan ASN Non Aktif yang Diduga Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Tabel 19. Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan	Jumlah Rekomendasi	Telah Ditindanlanjuti	%
Netralitas	1.125	1.062	94%
PTDH ASN Tipikor	2.211	2.094	95%
ASN Non Aktif yang Diduga Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	76	11	15%
Total	3.412	3.167	93%

Sumber. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Apabila dibandingkan dengan target Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, capaian kinerja pada IKU ini masih terpaut 9%. Masih terdapat banyak ruang bagi Badan Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian sehingga pada akhirnya seluruh rekomendasi hasil

pengawasan dan pengendalian dari BKN dapat dipatuhi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada IKU ini meningkat 0,03% dari tahun sebelumnya. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Ketercapaian target ini didukung adanya upaya penerapan tindakan administratif yang dilakukan BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Tindakan administratif yang dimaksud adalah tindakan administratif yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.

Dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya, ada beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya:

- 1) Penerapan tindakan administratif yang lebih komprehensif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.
- 2) Penyempurnaan database agar penyajian data tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian dapat lebih luas terkait aspek manajemen ASN.

A.9 IKU 9

“Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu”

Peningkatan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di laksanakan dengan pemberian pelayanan sesuai dengan SOP serta ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pelayanan kepegawaian yang optimal dan tertib administrasi memiliki pengaruh penting pada manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 27 Rekapitulasi Layanan Kepegawaian BKD Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH USULAN	YANG TERTANGANI		
			SUDAH	BELUM	%
1	LAYANAN MANDIRI	929	927	2	99,78%
	Izin Belajar	115	114	1	99,13%
	Tugas Belajar	12	12		100,00%
	Jabatan Fungsional	800	799	1	99,88%
	Usul Cuti	2	2		100,00%
2	LAYANAN USUL	14343	14049	294	97,95%
	Kenaikan Pangkat	2540	2540		100,00%

NO	JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH USULAN	YANG TERTANGANI		
			SUDAH	BELUM	%
	Mutasi	289	25	264	8,65%
	Pencantuman Gelar	45	40	5	88,89%
	KARIS/KARSU	352	348	4	98,86%
	Perbaikan Data	9271	9265	6	99,94%
	Usul CLTN	2	2		100,00%
	Pensiun	289	289		100,00%
	Kenaikan Gaji Berkala	7	7		100,00%
	Pengangkatan PNS	1053	1053		100,00%
	Pengumpulan SKP	54	54		100,00%
	Pengusulan Peninjauan Masa Kerja	5	5		100,00%
	Perbaikan SK Petikan	0	0		0,00%
	Usul Satya Lencana	280	280		100,00%
	Usul KARPEG	151	136	15	90,07%
	Assessment Mutasi	0	0		0,00%
	Izin Kawin/Cerai	4	4		100,00%
	Laporan Kasus Pidana	1	1		100,00%
	JUMLAH KESELURUHAN	15272	14976	296,00	98,06%

Sumber : Data diolah dari SiTaguh BKD, 2023

Indikator Kinerja Utama : **Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu** diukur dengan :

$$\frac{\text{Jumlah usulan layanan kepegawaian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah semua usulan layanan kepegawaian yang masuk ke BKD dalam satu tahun}} \times 100 \%$$

Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas indikator yang kinerja terdiri dari tabel berikut :

Tabel 28 Capaian IKU 9 : Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
IX	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Orang	85%	98,06%	115,36% Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Usulan Pelayanan Kepegawaian BKD 2023

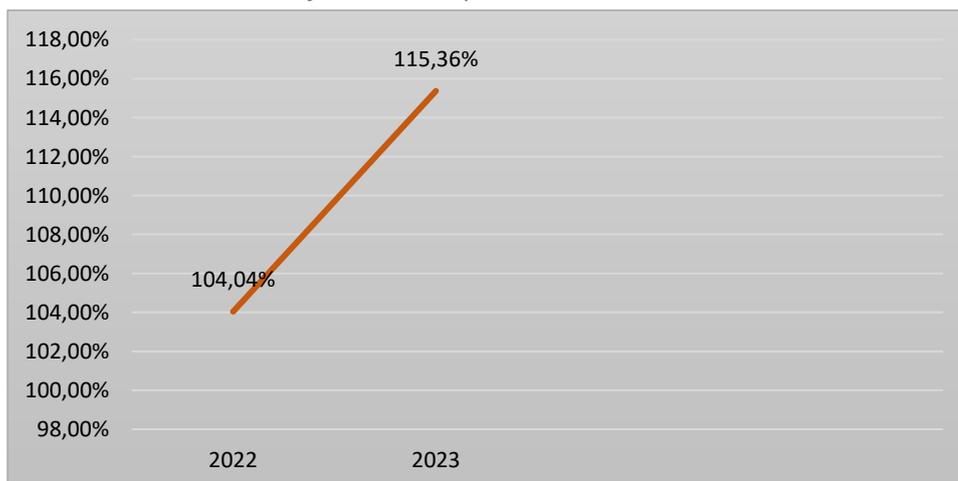
Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu” adalah sebesar 115,36% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 9 per triwulan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 64 Realisasi IKU 9 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Gambar 65 Grafik Capaian Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu Tahun 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja 2022, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Dari hasil grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Realisasi IKU 9 Dengan Target Badan Kepegawaian Negara

Realisasi IKU 9 yaitu Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu tidak memiliki target secara nasional. Hal ini dikarenakan IKU 9 merupakan capaian kinerja dalam perspektif *customer*.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Sekalipun indikator ini sudah tercapai sesuai dengan target renstra Badan Kepegawaian Daerah tahun 2026, pengukuran IKU 8 ini tetap dilanjutkan sesuai Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Untuk itu, BKD terus berupaya dalam meningkatkan komitmen pencapaian indikator ini. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BKD dalam mempertahankan kinerjanya pada periode berikutnya sekaligus peningkatan pelayanan kepegawaian segi kualitasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian informasi secara intensif mengenai pelayanan kepegawaian pada pengelola kepegawaian di setiap perangkat daerah;
- 2) Mengadakan pelatihan non klasikal terkait layanan kepegawaian kepada para admin layanan kepegawaian di BKD Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Koordinasi intensif baik di instansi pusat maupun dengan Kantor Regional BKN terkait informasi terupdate aturan-aturan terkait kepegawaian di Instansi Daerah.

A.10 IKU 10

“Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN”

Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara baik struktural maupun fungsional dalam setiap level harus diisi oleh personil yang telah lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikasi keahlian. Kebijakan ini sudah harus wajib diterapkan oleh para pimpinan instansi dan para kepala daerah agar pemerintah memiliki tata kelola pemerintah yang profesional serta akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pemerintah serta mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, Ujian Penyesuaian Ijazah, Asesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja Utama : **Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN** diukur dengan :

$$\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus}}{\text{Jumlah peserta keseluruhan}} \times 100 \%$$

Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas indikator yang kinerja terdiri dari tabel berikut :

Tabel 29 Capaian IKU 10 : Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
X	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	72%	71,30%	99,03% Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

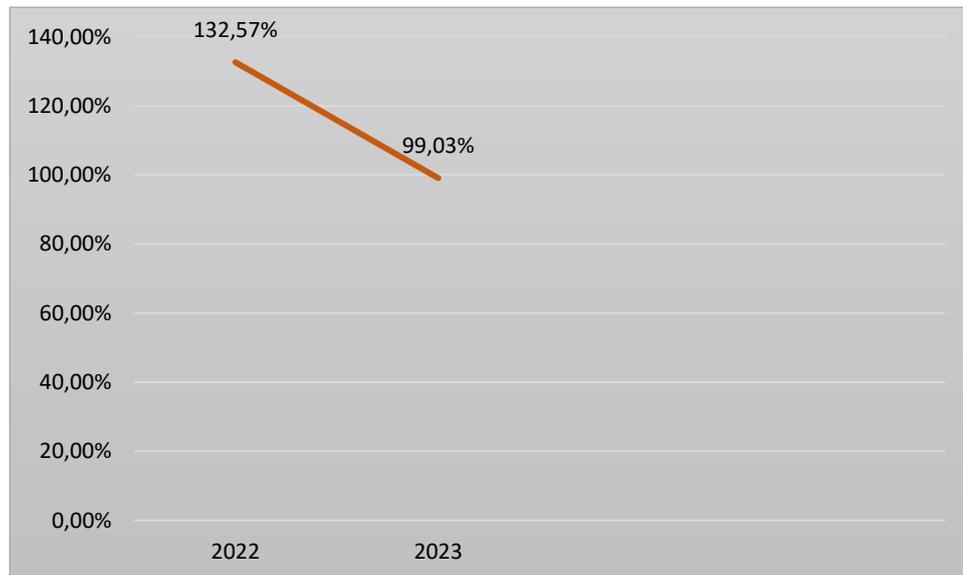
Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN” adalah sebesar 99,03% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun realisasi capaian IKU 10 dengan target jangka menengah dapat digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 66 Realisasi IKU 10 sampai dengan TA 2023 dibandingkan dengan target Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Gambar 67 Grafik Capaian Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN Tahun 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Laporan Kinerja Triwulan 2023, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

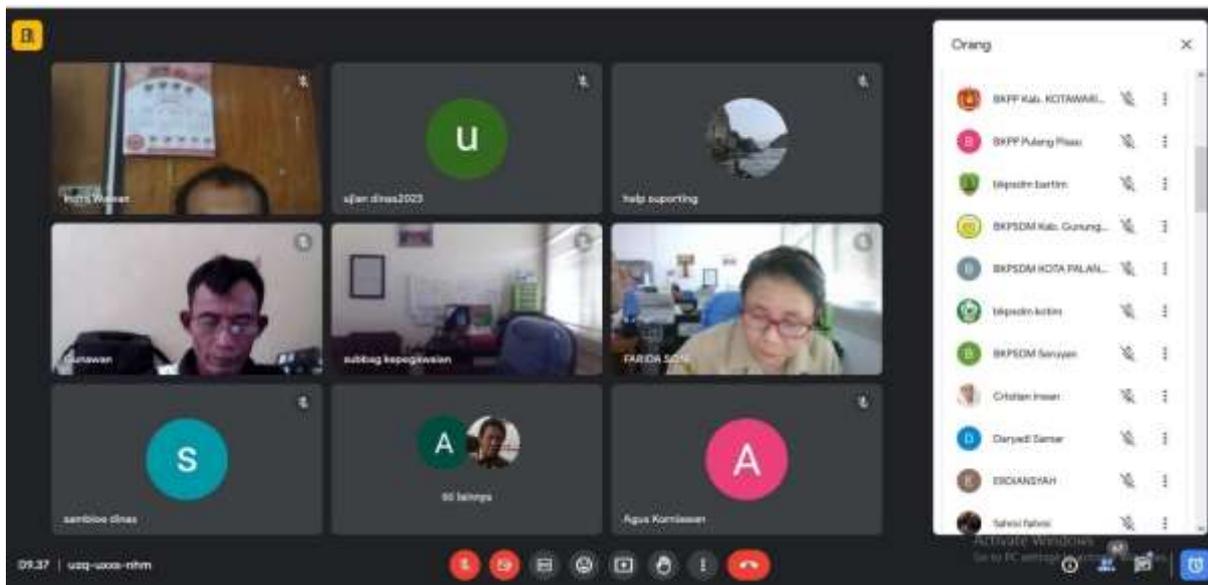
Dari hasil grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Asesmen Mutasi serta Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah. Hal ini dikarenakan jumlah formasi maupun kompetensi yang diperlukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan ASN yang usul masuk instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dengan adanya penerimaan PPPK tenaga guru yang cukup banyak sehingga anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah maksimal dalam hal belanja Pegawai. Kemudian untuk Penyesuaian Ijazah tidak terlaksana dikarenakan Peraturan Gubernur terkait Penyesuaian Ijazah ASN yang terbaru masih dalam proses.



Gambar 68 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : PPID BKD Prov Kalteng, 2023

Gambar 69 Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan II Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



Sumber : PPID BKD Prov Kalteng, 2023

Realisasi IKU 10 Dengan Target Nasional

Realisasi IKU 10 yaitu Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN tidak memiliki target secara nasional. Hal ini dikarenakan IKU 10 merupakan capaian kinerja dalam perspektif *costumer*.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 25 Juli 2023 sebagai salah satu persyaratan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Ujian Dinas tahun 2023 dilaksanakan secara virtual serta diikuti oleh 430 orang PNS lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilakukan di beberapa titik di wilayah Kalimantan Tengah pada dasarnya tidak menemui kendala yang berarti, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan mengenai infrastruktur/fasilitas yang digunakan didalam ujian diantaranya berupa perangkat kamera web PC yang kurang baik dimana pada beberapa titik ujian kamera web PC tidak dapat menampilkan kondisi ujian dengan cukup jelas sehingga Panitia Pelaksana Ujian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat memantau jalannya ujian. Oleh karena itu saran untuk pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah selanjutnya yaitu untuk mengatur standard infrastruktur termasuk didalamnya perangkat web PC yang digunakan diseluruh titik ujian. Dengan pengaturan standard infrastruktur Ujian diharapkan dari mulai gedung ujian hingga perangkat yang digunakan termasuk didalamnya Kamera web PC mempunyai kualifikasi yang memadai sehingga dapat meminimalisir adanya kendala dalam pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah kedepannya.

B. Capaian Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan Tahun 2023

Selain indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023, akan dijabarkan pula indikator kinerja lainnya yang relevan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebagai berikut:

B.1 Indeks NSPK

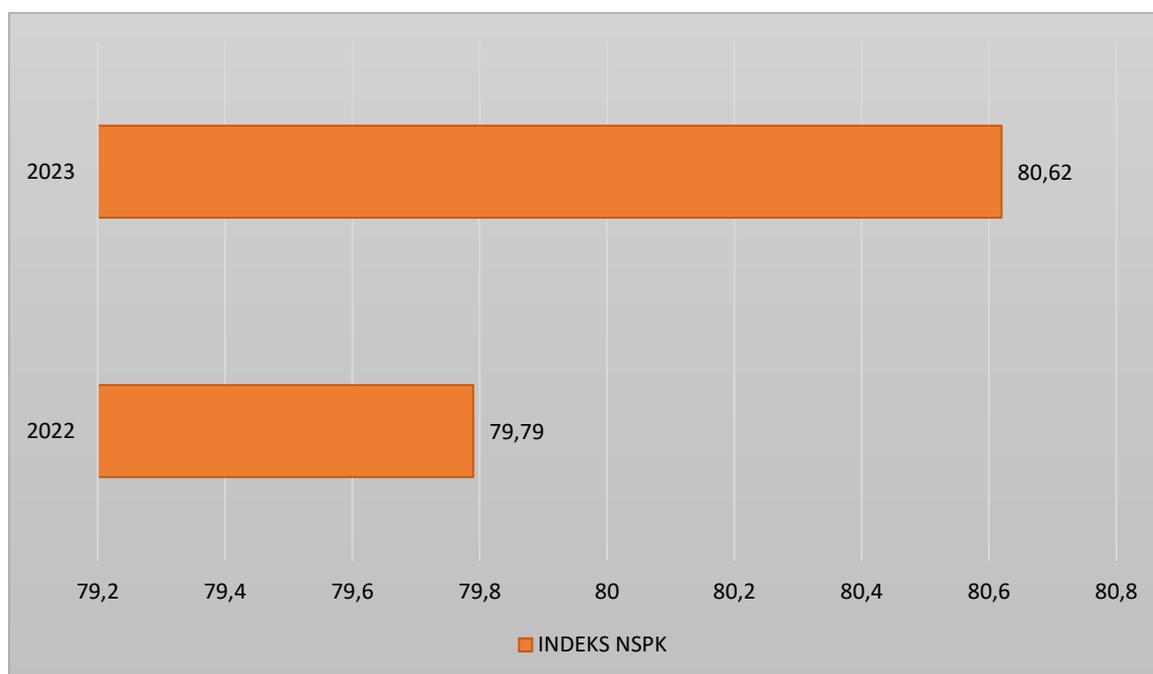
Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah di Indonesia mampu menerapkan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN.

Untuk menjamin keseragaman dalam penilaian implementasi NSPK manajemen ASN perlu adanya dasar dan pedoman dalam menilai implementasi manajemen ASN secara nasional. Untuk itu, BKN menetapkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN. Indeks implementasi NSPK manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN di instansi pemerintah.

Elemen dalam indeks implementasi NSPK manajemen ASN terdiri dari:

- penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
- pengadaan ASN;
- pengangkatan ASN;
- pangkat;
- mutasi;
- jabatan;
- pengembangan karier ASN;
- pola karier;
- penggajian, tunjangan, dan fasilitas;
- penghargaan;
- jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- perlindungan;
- penilaian kinerja;
- cuti;
- kode etik;
- disiplin;
- pemberhentian; dan
- pensiun.

Gambar 70 Grafik Perbandingan Penilaian Indeks NSPK Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2023



Sumber : Data diolah dari Penilaian Indeks NSPK Provinsi Kalimantan Tengah, BKN 2022-2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa kategori penilaian tertinggi pada hasil indeks NSPK tahun 2023 yaitu 80,62 terdapat pada nilai B. Pada tahun 2023, tren nilai mengalami perubahan yaitu terdapat sedikit peningkatan dengan kenaikan sebesar 1,02% dari tahun sebelumnya.

Realisasi Indeks NSPK Dengan Target Nasional

Tabel 30 Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Nasional	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Indeks NSPK	80,62	100	80,62%

Sumber : Data diolah dari SIASN BKN, 2023

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks Dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah bahwa yang mendapatkan nilai indeks dengan kategori B diberikan penghargaan berupa prioritas pendampingan dalam pengintegrasian sistem informasi kepegawaian Instansi dalam sistem informasi ASN.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Meningkatnya nilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada implementasi NSPK Manajemen ASN diantaranya karena beberapa faktor yaitu intensnya bimbingan teknis/pendampingan pengisian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang dilaksanakan tim kerja dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor lain yang mendorong peningkatan nilai indeks NSPK adalah masa penginputan data/bukti dukung yang lebih lama dimana pada tahun 2022 diberikan waktu sekitar 2 bulan namun pada tahun 2023 diberikan waktu selama 3 bulan sehingga instansi pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dokumen indeks NSPK. Selain itu faktor penting lainnya adalah dukungan dari unit teknis di BKD Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyediaan data/informasi/dokumen pendukung sebagai pembanding dalam memastikan kesesuaian implementasi NSPK manajemen ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam proses pelaksanaan penilaian Indeks NSPK yang dilakukan oleh tim penilai dari BKN, terdapat beberapa kendala yaitu ada beberapa bukti dukung yang tidak diterima dikarenakan telah lewat tahun pelaksanaannya, terutama bukti terkait pengelolaan pelanggaran disiplin yang memakan waktu yang lama dalam proses pemanggilan sampai dengan SK penjatuhan hukuman. Hal ini yang membuat ada beberapa bukti dukung yang tidak dapat dinilai oleh tim penilai dari BKN. Selanjutnya untuk meningkatkan capaian hasil pengawasan dan pengendalian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN pada tahun mendatang, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih proaktif dalam berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai nilai kategori A dan B, agar tetap konsisten menjalankan implementasi NSPK Manajemen ASN secara profesional.

B.2 . Survei Kepuasan ASN Terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian, baik di Instansi Pusat maupun di Instansi Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu fungsi penyelenggaraan Manajemen ASN. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Agar kualitas layanan pembinaan yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah dapat memenuhi ekspektasi penerima layanan pembinaan tersebut, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau stakeholders terhadap pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan survei ini didasarkan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mewajibkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat tersebut dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan perbaikan layanan di masa mendatang.

Survei kepuasan pembinaan Manajemen ASN secara umum dilaksanakan dengan membagikan formulir evaluasi pembinaan melalui *google form* sesuai dengan tema kegiatan yang telah dilaksanakan. Item pertanyaan yang tertera pada formulir terkait dengan tema kegiatan, ketepatan waktu penyelenggaraan, kelengkapan materi, pelayanan penyelenggara, narasumber, kualitas fasilitas pertemuan (baik secara daring maupun luring), panitia penyelenggara, dan sesi tanya jawab.

Pertanyaan survey dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama responden diminta untuk menilai performa, kenyamanan, keramahan dan fungsionalitas dari layanan satu pintu Badan Kepegawaian Daerah. Pada tahap kedua responden diminta untuk menilai Performa dan Fungsionalitas dari Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH).

Gambar 71 Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Tengah



The screenshot shows a web-based survey form titled "Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan" for the "Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah". The form is set against a blue background. It contains the following elements: a title bar, a "NIP" field with a "Bukan PNS" checkbox, a "Nama" field, a "Jenis Layanan" dropdown menu, a text area for "Tulis Pesan dan Saran Anda di sini", a "Pilih Reaksi" section with a red heart icon, and two buttons labeled "Submit" and "Back". A copyright notice "© 2024 Copyright: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng" is visible at the bottom.

Sumber : Screenshot aplikasi SITAGUH, BKD 2023

Kesimpulan yang didapat dari pengukuran tahap pertama menggunakan Skala *Likert* adalah Pelayanan Satu Pintu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat nilai **baik**, dimana Perilaku dari petugas layanan mendapatkan nilai tertinggi. Meskipun secara keseluruhan penilaian tahap pertama memperoleh nilai yang baik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan kecepatan memproses kendala dan penyelesaian usul layanan kepegawaian, dimana kedua komponen tersebut mendapatkan nilai terendah dari hasil survey tahap pertama.

Tahap kedua dari penilaian, yaitu penilaian atas manfaat, kemudahan akses dan fungsionalitas SITAGUH mendapat apresiasi tinggi dari para responden. Responden memberikan nilai sangat bermanfaat bagi implementasi SITAGUH di layanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan dari SITAGUH juga diperlukan, dimana ada *demand* yang tinggi agar SITAGUH dapat mengimplementasikan tanda tangan digital dalam pengoperasiannya. Dengan melihat fakta bahwa terdapat responden yang menilai masih sulit untuk mengoperasikan SITAGUH, diharapkan Sosialisasi pengoperasian dan pengembangan ke arah User-Friendly yang lebih baik dari SITAGUH dapat dilakukan secara berkala.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas tentunya meliputi beberapa unsur penunjang di dalamnya. Dari survei yang telah dilaksanakan, hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata yaitu :

1. Internalisasi maklumat Pelayanan BKD kepada seluruh pegawai BKD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Menerbitkan Surat Tugas Kepala BKD Nomor 800/ 264 /Skr.7/BKD Tanggal 19 April 2023 Perihal Melaksanakan Tugas Pelayanan di Loker Administrasi Kepegawaian sesuai dengan urusan masing-masing Bidang/Sekretariat. Hal ini dilakukan agar pegawai yang bertugas paham akan tanggung jawab untuk pelayanan kepegawaian yang diamanahkan.
3. Budaya Pelayanan yang diterapkan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminatif dan profesional. Program aksi pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi komitmen bersama untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih serta profesional. Selain itu, komitmen bersama para pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan melalui penandatanganan pakta integritas.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Serapan anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Realisasi		Efisiensi
		Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	122%	86,39%	29,18%

Dalam perhitungan efektivitas dan efisinesi anggaran digunakan formula sesuai dengan perhitungan efisiensi pada PMK No.214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{(16.816.733.914 \times 122\%) - 14.528.484.814}{16.816.733.914 \times 122\%} \times 100\% \\ &= \frac{20.516.415.375 - 14.528.484.814}{20.516.415.375} \times 100\% \\ &= \frac{5.987.930.561}{20.516.415.375} \times 100\% \\ &= 29,18\% \end{aligned}$$

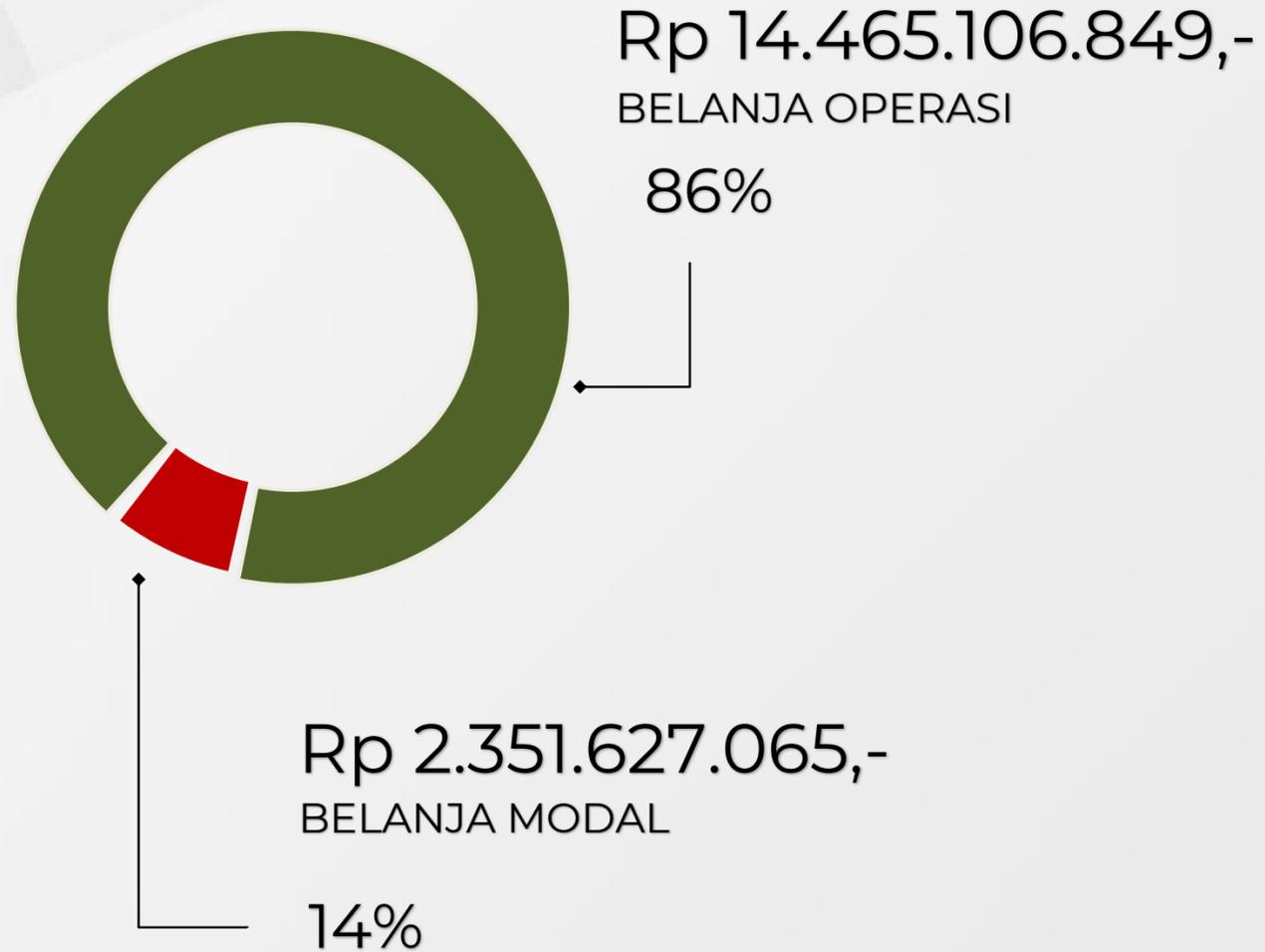
Berdasarkan tabel Serapan Anggaran BKD Tahun 2023 dapat disimpulkan nilai efisiensi sumber daya untuk Sasaran Strategis berada di atas di rentang -20 s.d 20. Hal ini dikarenakan untuk integrasi SI ASN masih berproses dan akan dioptimalkan pada tahun berikutnya. Dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2023 yang tertuang dalam penjelasan setiap indikator kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dapat mendorong BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengefisiensikan sumber dayanya dalam pencapaian kinerja.

D. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan alokasi anggaran BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan BKD Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada grafik dan tabel berikut :

Rp 16.816.733.914

TOTAL PAGU APBD PERUBAHAN 2023

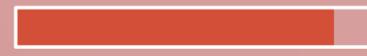


Rp 20.000.000

TARGET PENDAPATAN

Rp 12.188.696.814,-

BELANJA OPERASI

84,26% 

Rp 2.339.788.000,-

BELANJA MODAL

99,50% 

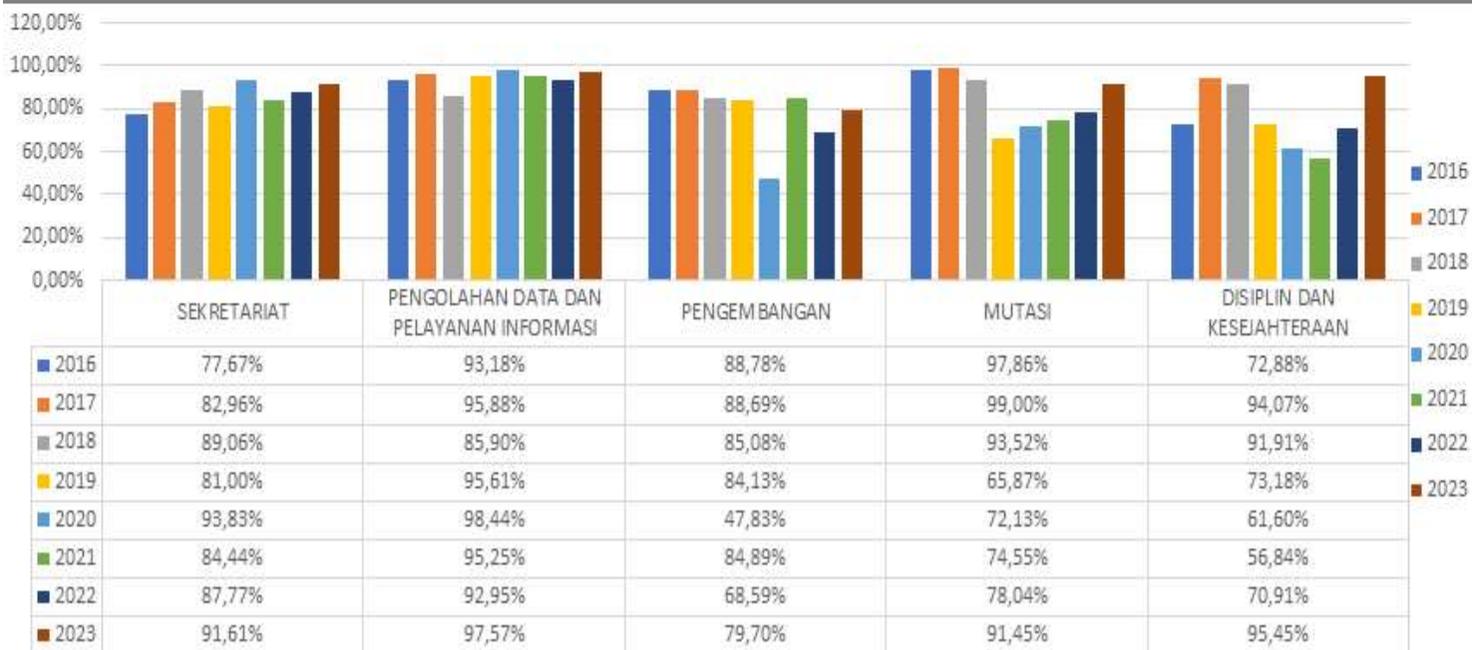
Rp 48.000.000,-

REALISASI PAD

240,00% 

Realisasi Keuangan BKD Tahun 2016-2023

Gambar
Realisasi APBD BKD Tahun 2016-2022



Tabel 31 Realisasi Belanja Langsung APBD BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.990.000	100.912.000	97,98%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.936.930.459	5.437.715.490	78,39%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.875.267.107	2.820.066.330	98,08%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	16.675.000	83,38%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.326.599.255	1.161.808.066	87,58%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.286.224	120.771.600	96,40%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.418.000	18.178.482	77,63%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.349.750	654.070.202	97,86%		
		2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	1.468.767.600	1.275.877.598	86,87%
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.987.357.620	2.661.059.096	89,08%
Pengembangan Kompetensi ASN	75.221.900			63.711.300	84,70%		
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	206.545.999			197.639.650	95,69%		
Jumlah			16.816.733.914	14.528.484.814	86,39%		

Sumber : Data diolah dari SIPD Kemendagri, 2023

Berdasarkan informasi pada tabel di atas bahwa total dari pagu anggaran belanja langsung APBD Tahun 2023 mencapai realisasi keuangan sebesar 86.39%. Persentase penyerapan belanja langsung tahun 2023 ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran belanja langsung BKD Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal adalah sebagai berikut :

1. Sisa Anggaran Belanja Operasi dan Modal yang tidak terealisasi sebesar Rp 2.288.249.100 atau 13.61% antara lain bersumber dari :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 8.90% (Rp 1.496.037.969,-)
 - b. Belanja tenaga administrasi (gaji tekun) tidak terserap dikarenakan pengurangan tenaga kontrak pemerintah provinsi pada BKD
 - c. Efisiensi belanja perjalanan dinas
 - d. Efisiensi honorarium
 - e. Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi dalam belanja barang dan jasa dikarenakan perbedaan harga pada standar harga satuan yang ada di SIPD lebih besar dari harga pasar.
2. Terdapat beberapa kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah yang tidak dapat terlaksana secara maksimal antara lain :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
3. Adapun kendala yang dialami yaitu :
 - a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Seleksi PPPK tidak terlaksana (formasi dari Menpan RB utk Prov Kalteng tidak tersedia)

Bab 4

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh serta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang

Bab 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Gambar 72 Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah beserta Jajaran Eselon III BKD Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : PPID BKD, 2023

Dengan adanya dinamika kebijakan yang sangat dinamis dalam pengelolaan SDM Aparatur dan juga tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin cepat dan terintegrasi, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan penyesuaian kebijakan, perbaikan tata kelola dan juga transformasi digital dengan penguatan infrastruktur, jaringan, dan sekuritas menuju digitalisasi Layanan kepegawaian yang terintegrasi. Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian 122%. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date, tercapai 105,56 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**;
2. Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi, tercapai 102,67% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**;
3. Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal, tercapai 142,86% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**;
4. Capaian Indikator Kinerja Utama 4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, tercapai 94,44% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**;
5. Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, tercapai 315,74% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**;
6. Capaian Indikator Kinerja Utama 6 Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah, tercapai 98,52% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**;
7. Capaian Indikator Kinerja Utama 7 Indeks Profesionalitas ASN, tercapai 94,54% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**;
8. Capaian Indikator Kinerja Utama 8 Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN, tercapai 100% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**;
9. Capaian Indikator Kinerja Utama 9 Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu, tercapai 115,36% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**; dan
10. Capaian Indikator Kinerja Utama 10 Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN, tercapai 99,03% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**.

BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp16.816.733.914,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp14.528.484.814,-** atau **86,39%** dari total alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Formasi pegawai belum terpenuhi karena banyaknya pegawai pensiun sehingga terjadi kekurangan pegawai hampir di seluruh SKPD.
2. Kebutuhan pegawai yang banyak tidak sebanding dengan pemberian formasi CPNS dari Kemenpan RB sehingga komposisi pegawai tidak seimbang dengan kebutuhan.
3. Pengembangan kompetensi pegawai kurang menyeluruh dan menyentuh seluruh aparatur yang ada.
4. Pelaksanaan sistem merit yang masih belum optimal.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka mencari solusi bersama permasalahan yang ada seperti dalam hal mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan.
2. Perlu dianggarkan kembali pemberian beasiswa Ijin Belajar maupun Tugas Belajar bagi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kompetensinya.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan OPD dan Pemerintah Pusat.
2. Melakukan percepatan penerapan sistem merit ASN melalui e Kinerja pada ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan rneningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
4. Koordinasi dan komunikasi internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara lebih intensif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.



BKD | BADAN
KEPEGAWAIAN
Provinsi Kalimantan Tengah | DAERAH

-  bkd@kalteng.go.id
-  JL. Willem AS No. 11 Palangka Raya
-  (0536) 3220942 & (0536) 3235428
-  bkd.kalteng.go.id

